

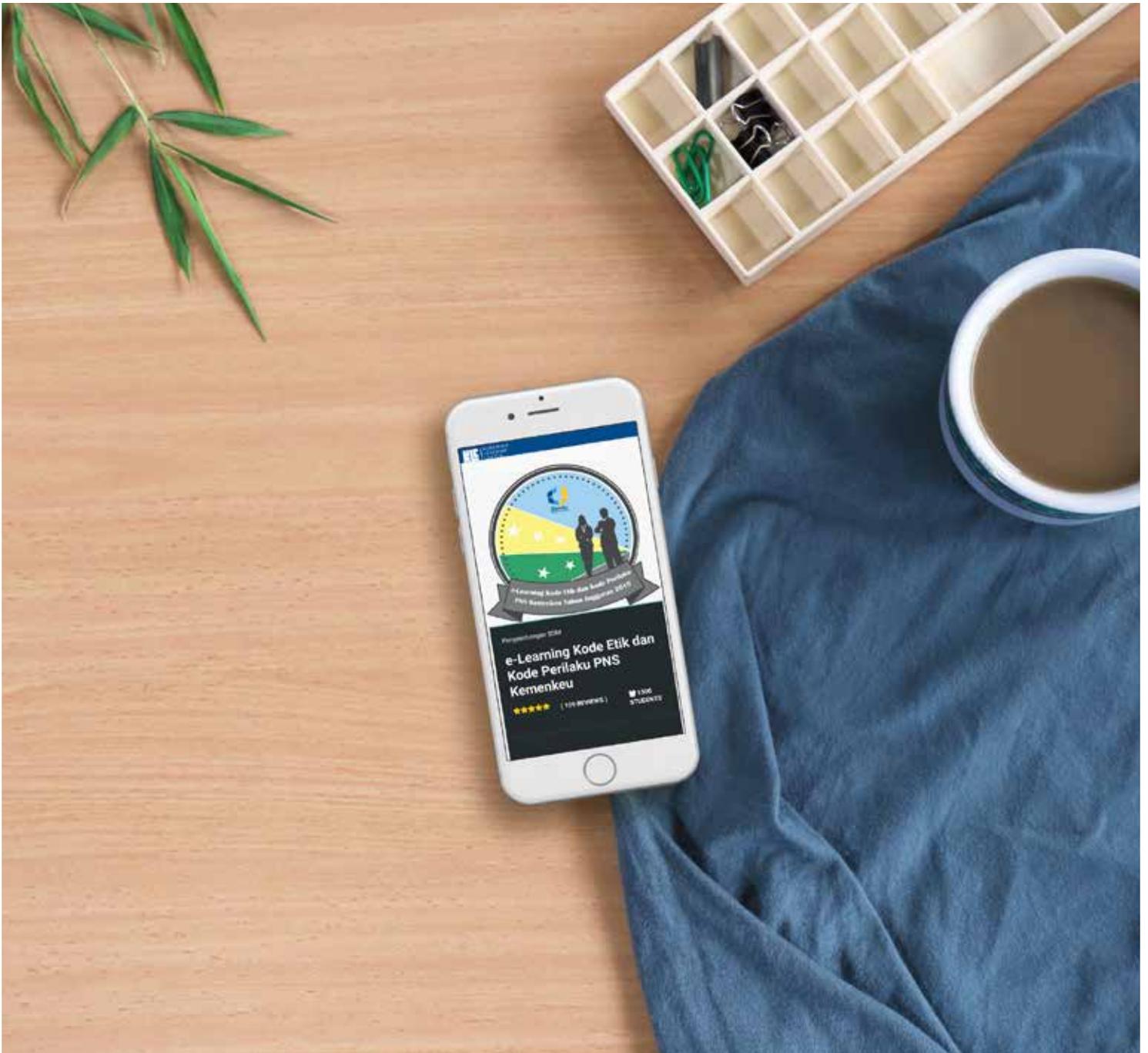
EDISI 53 / 2019

EDUKASI

K E U A N G A N

E- LEARNING KODE ETIK

Cara praktis untuk belajar pedoman etis



DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
INFOGRAFIS	12
LIPUTAN KHUSUS	17
PROFIL	22
SERAMBI ILMU	26
TEKA-TEKI EDUKASI	41
TAHUKAH KAMU	42
KOLOM <i>SOFTSKILL</i>	45
CERITA ALUMNI	48
TIPS & TRIK	51
MATA AIR	53
KESEHATAN	56
<i>POINT OF INTEREST</i>	58
RESENSI	60
GALERI	62
KANG EDU	64

Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB Sekretaris BPPK

PEMIMPIN REDAKSI Sugeng Satoto

SEKRETARIAT Abdul Aziz Maghfur Dodi Septariza Naseh Iskandar Eko Supriyono Fitria Sri Wulandari Thalia Maudina

REDAKTUR Hartono Kristian Agung Prasetyo Sintawati Arfin Inwan Hadiansyah Irwandi Hidayat Ferry Irawan Eko Prasetyo Setyawan Dwi Antoro Andi Manaek Daniel Pangaribuan Tri Wibowo Rachmatunnisya Sunardi Rio Suareski Eri Haryanto Pilar Wirotama

EDITOR Sudrajat Ari Sandi Robert Retyan Laksita Mutiary Ardes Martua Sitanggang Yohana Tolla Imam Asma Nur Alam Marbun Ridwan Sidik Kurniawan Bima Lingga Sakti Luqman Hakim Arimbi Putri

DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER Muhammad Fath Kathin Victorianus M. I. Bimo Adi Seno Adi Nugroho

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ALAMAT REDAKSI

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131
Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Politeknik Keuangan Negara STAN
Tangerang Selatan, Indonesia

Oktober 2019

Tema

“ Akuntabilitas Laporan Keuangan BUM Desa dalam rangka Mewujudkan BUM Desa yang Profesional sebagai Pilar Ekonomi Desa

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SEMBADHA) 2019 yang merupakan wadah kerjasama antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintahan dan pelaku lain dalam upaya diseminasi dan kerjasama kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Politeknik Keuangan Negera STAN. Kegiatan tahun ini merupakan kali kedua diselenggarakan oleh PKN STAN presentasi Call For Paper akan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2019 Seminar SEMBADHA 2019 akan diselenggarakan di Kampus PKN STAN pada tanggal 11 Oktober 2019.

Bidang kajian yang ikut serta dalam Call For Paper adalah :

- Pertanian, Perikanan, dan Kelautan
- Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana
- Kesehatan
- Ekonomi, Manajemen, Akutansi, Sosiasl, dan Budaya
- Teknologi Terapan, Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Pendidikan

CALL FOR PAPER / PARALLEL SESSION

Kamis, 10 Oktober 2019

**Gedung J
PKN STAN**

08.00 - 15.00 WIB

SEMINAR NASIONAL SEMBADHA 2019

Jumat, 11 Oktober 2019

**Gedung G
PKN STAN**

08.00 - 15.00 WIB

GLOBAL PUBLIC SECTOR INNOVATION FAIR 2019

Kamis-Jumat
10-11 Oktober 2019

**Gedung SC
PKN STAN**

08.00 - 15.00 WIB

Penyelenggara



Co Host



Kontak

0815 1058 4137 (Nurhidayati/CFP)
0818 0866 9736 (Ayu/CFP)
0813 2415 3163 (Rame/FAIR 2019)

Join Group Telegram :
bit.ly/sembadha2019



SALAM REDAKSI

Sebagai insan aparatur sipil negara (ASN), kita tidak hanya dituntut untuk cakap bekerja dan berkemampuan tinggi, tetapi juga harus memiliki etika dan perilaku yang baik. Hal ini acapkali dianggap sebagai hal kecil, namun sebenarnya ibarat gunung es. Kemampuan dan kepribadian ASN yang mumpuni justru tercermin dari bagaimana mereka bersikap dan beretika, yang telah diatur sebagaimana PMK Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, kami ulas secara mendalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Kode Etik dan Kode Perilaku PNS yang diselenggarakan secara digital (*e-learning*). *E-learning* ini menjadi suatu hal yang penting yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan di seluruh penjuru Nusantara. Pembelajaran ini juga sekaligus menjadi pengingat betapa pentingnya memiliki etika dan perilaku yang baik sebagaimana diharapkan dari seorang aparat negara. *E-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS menjadi salah satu pembelajaran dalam jaringan dengan skala terbesar yang pernah diselenggarakan BPPK.

Salah satu poin yang menjadi penekanan dalam kode etik dan perilaku PNS yaitu pegawai yang berintegritas guna meningkatnya kualitas sumber daya pengelola keuangan negara. Hal tersebut pula yang tercermin dalam Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA) yang akan dikupas dalam rubrik Liputan Khusus. Tak ketinggalan di rubrik Profil kami bahas salah satu pegawai kebanggaan BPPK yang berhasil menyabet titel Widyaiswara Berprestasi Nasional, Junaedi Purnomo.

Anda tentunya tak ingin melewatkan serangkaian rubrik menarik lainnya dari Majalah Edukasi Keuangan seperti Cerita Alumni, *Point of Interest*, Galeri, Kang Edu, Tahukah Kamu, dan masih banyak lagi. Setiap edisinya kami selalu menghadirkan topik-topik yang segar, menarik, dan tentunya informatif untuk Anda nikmati. Jangan ragu untuk menjelajah pengetahuan bersama kami, dan selamat membaca!



WORKSHOP BEA CUKAI

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rionald Silaban membuka secara resmi *Workshop on Coordinated Border Management Against Transnational Organized Crime* yang bertempat di Pusdiklat Bea dan Cukai pada tanggal 13 Agustus 2019

SENO ADI NUGROHO

LINTAS PERISTIWA

Juli - Agustus



PENGHARGAAN LAN

BPPK dinobatkan sebagai LPP Terbaik 2019: *Learning Centre for the Fourth Industrial Revolution* kategori Lembaga Pemerintah Pusat Terakreditasi Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar CPNS Terbaik ke-III melalui Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Keuangan. BPPK juga meraih penghargaan Peringkat I Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 melalui Junaedi Purnomo, Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Selain itu, dalam kategori Kompetisi Inovasi Pelatihan Kepemimpinan III, BPPK juga meraih peringkat III terbaik melalui Agung Yuniarto, Pejabat Administrator pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.



PENGHARGAAN PUSDIKLAT AP

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Pemerintah Kinerja Terbaik Tahun 2019 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penyerahan penghargaan tersebut bertempat di Aston Hotel Batam pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam acara Rapat Koordinasi LPPBJ dan Fasilitator PBJ yang diselenggarakan oleh LKPP.



PELANTIKAN WIDYAIKWARA BARU

Senin, 26 Agustus 2019. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rionald Silaban melantik Rahman Ritza sebagai widyaiswara baru di Pusdiklat Keuangan Umum dan Budhi Setyawan sebagai dosen baru di PKN STAN.

YOHANA TOLLA

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA



Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Laju perkembangan teknologi informasi diiringi dengan semangat transparansi di segala sektor, termasuk pemerintahan, membuat ASN harus cakap bersikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa meninggalkan profesionalitasnya. Untuk mewujudkan aparat pemerintahan yang bersih, masing-masing organisasi pemerintahan diamanatkan untuk menyusun perangkat peraturan, melakukan penegakan, serta pembinaan tentang kode etik kepada setiap ASN di lingkungannya.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Dengan adanya Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Penerapan kode etik bertujuan untuk membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil, mendorong etos kerja Pegawai Negeri sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat, dan menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan kode etik memegang peranan penting dalam peningkatan profesionalitas ASN. Meskipun demikian, penegakan kode etik di kalangan ASN masih dikatakan lemah. *Policy Brief* Komisi

Aparatur Sipil Negara (2018) menyatakan bahwa pelanggaran kode etik dan kode perilaku di kalangan ASN masih tergolong tinggi. Terdapat 1.879 ASN yang tersandung kasus hukum, dimana 58% merupakan kasus korupsi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kasus korupsi memiliki kaitan dengan posisi ASN dalam jabatan. Dilihat dari kelompok usia, 39% ASN yang tersandung kasus hukum berada pada rentang usia 51 tahun ke atas dan 30% ASN berada pada rentang usia 41 - 50 tahun. Pada kedua rentang usia ini, pegawai sudah memiliki masa kerja yang cukup panjang, minimal di atas 10 tahun dan sudah memiliki jabatan dan kewenangan di dalam organisasinya. Kasus hukum lainnya yang menjerat ASN adalah kasus narkoba, perlindungan anak, penipuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus lainnya. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN dapat berupa pelanggaran netralitas. Data KASN menyatakan di tahun 2018 terdapat 491 pengaduan terkait pelanggaran netralitas ASN pada 171 daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

KASN menyoroti kurangnya komitmen pimpinan instansi dalam melakukan penegakan kode etik. Hal ini ditunjukkan dengan masih ada instansi yang belum memiliki peraturan terkait kode etik,

Mengingat fungsinya sebagai sistem peringatan dini, maka proses internalisasi kode etik dan kode perilaku harus dapat berjalan dengan optimal sehingga setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama sehingga potensi pelanggaran dapat ditekan seminimal mungkin.

terutama pada Pemerintahan Daerah. Di tahun 2018, hanya 50% Pemerintah Provinsi dan 16% Pemerintah Kota/ Kabupaten yang memiliki peraturan terkait kode etik. Selain itu, sosialisasi dan internalisasi penerapan kode etik juga masih dinilai kurang yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman pegawai dan bermuara pada tingginya pelanggaran kode etik.

PEMBINAAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan telah menyusun peraturan terkait kode etik, yang terbaru adalah PMK Nomor 190/PMK.01/2018 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini disusun dengan mempertimbangkan adanya perubahan teknologi, nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat. Selain itu, peraturan ini disusun sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran disiplin pegawai Kementerian Keuangan serta menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, maka Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui Biro Sumber Daya Manusia mengadakan kegiatan terkait pembinaan dan penegakan kode etik dan kode perilaku. Kegiatan dimaksud meliputi pembelajaran *e-learning*, Diseminasi Regulasi di Bidang Sumber Daya Manusia yang dilakukan di beberapa kota, publikasi (gambar, video, dan buku saku terkait kode etik dan kode

perilaku), dan menyediakan layanan konsultasi. Pada kegiatan Diseminasi Regulasi di Bidang Sumber Daya Manusia, salah satu materi yang diberikan adalah PMK Nomor 190/PMK.01/2018. Kegiatan ini berlangsung secara bertahap, dimulai pada bulan April sampai Juli 2019.

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menginternalisasikan kode etik dan kode perilaku di lingkungan Kementerian Keuangan adalah pelatihan Kode Etik dan Kode Perilaku. Pelatihan ini terlaksana atas kerja sama antara Biro SDM Sekretariat Jendral dan BPPK. Pelatihan dilaksanakan menggunakan metode *e-learning* yang dapat diakses melalui laman klc.kemenkeu.go.id. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kode etik Kementerian Keuangan. Mengingat fungsinya sebagai sistem peringatan dini, maka proses internalisasi kode etik dan kode perilaku harus dapat berjalan dengan optimal sehingga setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama sehingga potensi pelanggaran dapat ditekan seminimal mungkin.

Pemilihan *e-Learning* sebagai media internalisasi kode etik dan kode perilaku disebabkan oleh beberapa hal. Alasan yang pertama adalah sifatnya yang efektif, efisien, cepat, dan kredibel untuk menyampaikan materi sehingga sosialisasi dapat diberikan secara masif. Selain itu, metode ini dapat menjangkau banyak pegawai sekaligus tanpa meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, mengingat materi *e-learning* dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Seperti yang disampaikan pada *Policy Brief* KASN, dukungan dan komitmen pimpinan instansi merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan dan pembinaan kode etik dan kode perilaku.

Pelatihan Kode Etik dan Kode Perilaku ini, yang merupakan bagian dari kegiatan internalisasi kode etik dan kode perilaku di lingkungan Kemenkeu, mendapatkan sambutan dan dukungan dari jajaran pimpinan di lingkungan Kemenkeu. Hal ini ditunjukkan dengan diluncurkannya pelatihan ini pada kegiatan *Workshop* SDM “ASN Sebagai Perikat Bangsa” pada tanggal 4-5 Juli 2019. Peluncuran ini mendapatkan sambutan dan antusiasme positif dari peserta kegiatan yang merupakan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrator di lingkungan Kemenkeu. selain itu, Sekretariat Jenderal juga menerbitkan Surat Edaran yang mengimbau seluruh pegawai untuk melaksanakan *e-learning*. Dukungan juga diberikan dari Menteri Keuangan dengan memberikan ucapan selamat pada semua peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program melalui video pada akhir program.



ARIMBI PUTRI

TAK GENTAR, MENGHAJAR BAHAN AJAR E-LEARNING KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PNS KEMENKEU

Perencanaan dan penyelenggaraan E-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu yang terbilang singkat menjadi tantangan tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Salah satunya, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusdiklat PSDM) sebagai penyelenggara pelatihan dalam jaringan tersebut. Terlebih, e-learning kali ini dapat dikatakan memiliki lingkup terbesar, yakni wajib diikuti oleh lebih dari 81 ribu pegawai Kementerian Keuangan yang tersebar di seluruh penjuru negeri.

Pusdiklat PSDM yang terbiasa menangani *e-learning* peserta pelatihan dasar (latsar) dengan lingkup yang juga cukup besar, kini dihadapkan *e-learning* dengan cakupan yang lebih luas lagi. Tantangan ini dirasakan terutama pada instansi yang memiliki unit-unit yang tersebar di daerah.

“*E-learning* ini cakupannya sangat masif, tingkatnya lebih besar dari latsar, dan peserta latsar bisa dikatakan lebih mampu dikondisikan. Yang susah yang punya kanwil-kanwil, mereka harus pake ND (nota dinas). Karena persiapannya sempit, kirim ND waktunya juga mepet. Ada *batch* pertama yang telat menerima ND. Mereka sudah panik duluan, karena bersifat *mandatory* (wajib), pesertanya sudah terlanjur mengerjakan padahal belum

jadwalnya,” ungkap Dio Koes Brilianto, salah satu pegawai Bidang Penjurusan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi Pusdiklat PSDM.

Untuk menjembatani berbagai kendala yang terjadi akibat besarnya jumlah peserta *e-learning* ini, Pusdiklat PSDM menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya membagi pelatihan ke dalam beberapa *batch*, membuat penjadwalan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit, meminta Biro Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) yang berisi kewajiban seluruh peserta untuk mengikuti *E-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu, membentuk tim administrator Kemenkeu Learning Center (KLC), dan membuat grup Telegram untuk penanganan masalah yang terjadi selama pelaksanaan.



FOTO: BIMMO ADI

Banyaknya jumlah peserta *e-learning* menjadi alasan pemilihan Telegram sebagai *platform helpdesk E-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS tersebut. Meski memang, belum banyak peserta yang familiar dengan aplikasi ini. Berdasarkan sumber dari katadata.co.id, grup aplikasi perpesanan berlogo pesawat kertas ini mampu menampung hingga 200 ribu anggota. Selain itu, grup Telegram dipilih karena fleksibilitasnya, di mana para peserta dapat masuk dan keluar grup tanpa harus melalui persetujuan (*invite*). Administrator dari Pusdiklat PSDM akan merespons setiap pertanyaan yang diajukan peserta melalui grup Telegram tersebut.

Selain cakupannya yang luas dan jumlah peserta yang masif, waktu yang relatif

singkat juga menjadi tantangan bagi penyelenggara untuk merealisasikan *e-learning* ini. Penyusunan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) dilakukan sejak bulan Maret 2019, dan sempat terkendala dengan adanya libur hari raya Idul Fitri yang jatuh pada Juni lalu. Karena itulah, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan *e-learning* tersebut berusaha mempercepat proses pengerjaan hingga akhirnya berhasil diselesaikan pada pertengahan Juni.

Seluruh proses penyusunan *E-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu tersebut berhasil rampung dalam kurun waktu dua bulan, yang meliputi sejumlah rapat koordinasi dan pembagian tugas, penyusunan materi oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal,

penyusunan *storyboard* oleh Pusdiklat PSDM, pengerjaan animasi oleh pihak ketiga, penyusunan video *knowledge capture* oleh Pusdiklat PSDM, revisi konten, dan diakhiri dengan proses uji coba.

Proses uji coba yang diikuti oleh ribuan pegawai ini pula memakan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, kuis *E-Learning* Kode Etik ini berbeda dengan *e-learning* pada umumnya, khususnya pelatihan dasar yang banyak diikuti pegawai Kemenkeu. Jika pada *e-learning* latsar peserta cukup mendapatkan nilai maka sudah terekam dalam sistem, berbeda halnya dengan *E-Learning* Kode Etik. Pada *E-Learning* Kode Etik ini peserta diharuskan melakukan "*submit data*" agar nilai kuis terekam dalam sistem dan

dinyatakan telah menyelesaikan *e-learning* tersebut.

"Banyak kasus peserta yang tidak *submit* nilai kuis, sehingga menyebabkan data hasil kuis tidak tersimpan, dan peserta harus mengikuti kuis ulang," ungkap Irfan Ramdani, pelaksana pada Bidang Penjurangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi Pusdiklat PSDM. Hal ini menjadi suatu pembelajaran bagi para peserta untuk membaca panduan dan petunjuk pelaksanaan yang telah diberikan Pusdiklat PSDM sebelum melaksanakan *e-learning*.

Proses penyusunan materi dan soal kuis pun dilakukan secara cermat oleh Biro SDM, diperkaya dengan contoh kasus dan video *knowledge capture* yang melibatkan 12 Widyaiswara Pusdiklat PSDM. Meski awalnya hanya diminta dalam bentuk paparan sederhana, BPPK berusaha memberikan pembelajaran yang optimal dilengkapi dengan animasi, hingga ditutup dengan video dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Sehingga materi yang disajikan lebih menarik, segar, dan interaktif.

RESPONS POSITIF DAN ANTUSIASME TINGGI

Meski dalam penyusunan *E-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu ini masih banyak hal yang harus dikembangkan dan dievaluasi, di luar dugaan antusiasme peserta cukup besar dalam pengerjaannya. Sempat khawatir dengan jumlah peserta, pihak Pusdiklat PSDM justru terkejut dengan meledaknya peserta di awal *batch e-learning* ini.

"Selesai penyusunan di pertengahan Juni, presentasi, revisi, dan lain-lain akhirnya launching *e-learning* ini ditetapkan di tanggal 15 Juli. Ternyata respons dari Kepegawaian masing-masing unit sangat baik. Awalnya kami khawatir kekurangan peserta. Malah antusiasme besar di awal, awal-awal lebih dari 5.000 (peserta) terus," urai Irfan.

Antusiasme tersebut juga terlihat dari beberapa unit yang menunjuk *person in charge* (PIC) untuk memantau pengerjaan *E-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu di kalangan pegawai. "Malah Kanwil DJKN Jawa Barat itu ada satu hari khusus mereka bimbel kode etik, gitu. Jadi dibimbing sama orang yang sudah biasa KLC. Pada saat pengerjaannya pun mereka diberi alokasi waktu khusus," tambah dia.

Tak hanya antusiasme yang cukup besar, respons positif juga ditunjukkan dengan *rating* penilaian *course* ini yang mencapai 4,8 dari skala 5,0 terhitung hingga medio pelaksanaan *batch e-learning* ini (*batch VIII*). Sebagian peserta menilai *E-Learning* Kode Etik ini merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran yang lebih mudah diakses oleh cakupan peserta yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian lainnya juga memberikan masukan yang positif dan membangun untuk perbaikan pembelajaran ke depannya.

Demi kenyamanan dan kelancaran peserta dalam pengerjaan *e-learning* ini, Pusdiklat PSDM memberikan pesan bagi para peserta yang baru akan mengikuti *E-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu. "Peserta harus mengetahui jadwal pelatihan *e-learning* yang sudah disusun oleh pembina Kepegawaian di unit eselon satunya masing-masing, membaca buku panduan pelaksanaan *e-learning*, dan bergabung pada grup yang sudah disediakan subbidang Penyelenggaraan, Pusdiklat PSDM."



BIMO ADI

INFOGRAFIS

Q&A E-LEARNING KODE ETIK

01 TIDAK BISA LOGIN

Tidak bisa login Semantik untuk ikut e-learning kode etik, bagaimana?

Cukup mengerjakan e-learning di KLC, untuk Semantik akan di-update Pusdiklat PSDM menggunakan data HRIS.



02 CEK NILAI

Mau cek nilai saya sudah masuk apa belum? Bisa di mana ceknya?

Bisa diakses di bit.ly/NilaiBatchX (X diganti batch peserta, misal batch 10 diganti menjadi bit.ly/NilaiBatch10).



03 NILAI BELUM ADA

Saya sudah akses bit.ly/NilaiBatchX, kok nilai saya belum ada?

Silakan diakses secara berkala, nilai di-update pada pukul 08.00, 12.00, 15.00 dan 19.00 WIB.



04 MENCOBA KUIS 3X

Kuis maksimal 3x, kalau saya mau coba 3 kali, apakah bisa? nilai mana yang diambil?

Bisa, nilai yang diambil adalah nilai tertinggi.



05 PROGRESS TIDAK 100%

Sudah mengerjakan kuis dan kode etik e-learning, progress masih 87.33% tidak 100% bagaimana?

Selama nilai sudah terekam dan muncul pada tautan bit.ly/NilaiBatchX, tidak masalah terkait progress di KLC.



06

SUDAH KUIS, NILAI BELUM ADA

Saya sudah mengikuti kuis tapi nilai belum ada, apa yang harus saya lakukan?

Jika masih dalam periode *batch*, silakan mengikuti kuis dengan klik di kuis dan pastikan *submit* setelah selesai kuis. Jika periode *batch* sudah lewat, silakan menunggu pengumuman peserta, akan ada *e-learning* khusus *batch* kuis.



07

SUDAH DAPAT BADGE, NILAI BELUM ADA

Saya sudah dapat badge di KLC dan sudah menonton video Bu Menteri, tapi nilai tidak tercantum di bit.ly/NilaiBatchX

Badge tidak menentukan terekam atau tidaknya nilai peserta. Jika nilai tidak ada dalam daftar, maka datanya belum terekam (belum *submit* data) dan diharuskan mengerjakan kuis ulang.



08

JADWAL Pengerjaan SAMPAI KAPAN

Jadwal pengerjaan e-learning dalam satu batch sampai kapan?

Sampai dengan hari Jumat pukul 23.59 pada *batch* berjalan.



09

JADWAL BENTROK

Jadwal batch yang sudah ditentukan ternyata bentrok dengan agenda penting lainnya, bagaimana?

Silakan berpindah ke *batch* selanjutnya dengan menginformasikan ke Bagian Kepegawaian unit masing-masing.



10

USERNAME ALREADY EXIST

Saya tidak dapat login ke KLC, muncul username already exist atau nama akun berubah menjadi nama akun lain

Pastikan sebelum mengikuti *course*, Anda melengkapi dan memperbarui data di HRIS, khususnya nama, unit, NIP, dan alamat *email* dengan benar.



LUQMAN HAKIM

E-LEARNING KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PNS KEMENKEU di Mata Mereka

Tersedianya aparatur pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab merupakan harapan jutaan penduduk negeri ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, sudah seharusnya para pegawai negeri sipil (PNS), termasuk di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mempunyai landasan etika yang bagus dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, para pegawai Kemenkeu juga harus berperilaku baik dan menjaga martabatnya agar tidak melakukan pelanggaran disiplin yang dapat merusak citra pribadi maupun instansinya. Seluruh pedoman tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk memberikan pemahaman mengenai PMK tersebut kepada pegawai Kemenkeu secara menyeluruh, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) menyelenggarakan *e-Learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu. Metode pembelajaran *e-learning* ini dipilih sebagai wujud transformasi pembelajaran digital yang sedang digalakkan oleh BPPK. Ditambah lagi, metode *e-learning* ini dapat menghemat biaya dan waktu dalam penyelenggaraannya. Para pegawai tidak perlu meninggalkan kantor untuk

melakukan pembelajaran secara tatap muka di kelas. Mereka cukup mengakses Kemenkeu Learning Center (KLC) di depan layar komputer sehingga pengerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien.

Sebagai *e-learning* pertama yang diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh pegawai Kemenkeu, *e-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu memberikan nuansa pengalaman belajar yang baru dan berbeda dari pelatihan klasikal. Seluruh golongan pegawai Kemenkeu yang menjadi peserta, mulai dari Sabang hingga Merauke, muda maupun tua, pejabat dan pelaksana, memiliki cerita tersendiri

saat mengerjakan *e-learning* melalui portal KLC. Beragam komentar mereka mewarnai pelaksanaan *e-learning* yang terbagi dalam 16 angkatan atau *batch* ini.

Hingga artikel ini disusun, pelaksanaan *e-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS sudah berjalan sebanyak 6 *batch*. Masih tersedia 10 *batch* yang akan mencapai puncaknya pada bulan November mendatang. Sejauh ini, *e-learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS menuai respon yang cukup baik dari sebagian besar peserta yang telah selesai mengerjakannya. Banyak yang memberikan apresiasi positif, namun ada juga yang menyampaikan saran untuk perbaikan ke depannya.



FOTO: THALIA MAUDINA

TAMPILAN KONTEN SUDAH MENARIK, TAPI MASIH BISA DITINGKATKAN

Salah satu bentuk apresiasi positif dari peserta adalah tampilan konten pembelajaran *e-learning* yang menarik. Ricky Wisata Chandra, peserta dari batch IV menyebutkan bahwa penyampaian materi *e-learning* melalui media video dan animasi membuat belajar terasa sangat menyenangkan. “Seru sekali, desainnya bagus, belajar menjadi menarik dan tidak monoton,” ujar pegawai KPP Pratama Timika ini. Hal senada juga diutarakan Danang Endrayana, pegawai Biro OTL Sekretariat Jenderal Kemenkeu. “Pembuatan kontennya kreatif sekali dan membuat belajar tidak membosankan,” ungkap peserta pada batch pertama ini.

Meski demikian, terdapat beberapa peserta yang menganggap kualitas konten masih dapat ditingkatkan. Seperti yang disampaikan Anang Ma’ruf, pegawai KPPBC TMP C Ternate. “Saran saya, perbanyak video dan animasi yang menarik pada inti materi. Jangan hanya berupa teks seperti *slide* di dalam PowerPoint,” tambah Anang. Tak jauh berbeda dengan Anang, salah satu peserta bernama Sriyanto juga menyampaikan agar konten-konten yang terdapat di dalamnya lebih diperbanyak dengan video atau animasi interaktif dan studi kasus tentang penerapan materi terkait di lapangan. “Lebih sempurna lagi apabila ditambahkan fitur *fast forward* atau

kecepatan putar seperti di Podcast,” ujar pegawai yang berkantor di Sekretariat BKF ini.

WAKTU Pengerjaan yang FLEKSIBEL KARENA PEMBAGIAN BATCH

Selain desain konten yang menarik, *e-Learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu juga menyediakan waktu pengerjaan yang fleksibel. Para peserta mendapat kebebasan untuk memilih *batch* sesuai keinginan sendiri. Dalam setiap *batch*, para peserta memiliki waktu lima hari kerja (Senin sampai Jumat) untuk menyelesaikan *e-learning*. Hal ini didukung pula oleh penugasan resmi

dari kantor sehingga tidak mengganggu jam kerja pada saat peserta mengerjakan *e-learning* melalui KLC.

Fitriyati Anisah, pegawai KPKNL Tangerang II, menyebutkan bahwa pelaksanaan *e-learning* ini tidak hanya efisien dari segi waktu, melainkan juga dari biayanya. “*E-learning* yang mampu menambah wawasan dan pencerahan, dengan lebih efisien baik pada biaya dan waktunya,” ungkapnya. Mengamini pernyataan Fitri, salah satu peserta *batch* III bernama Yandini Iman Sari juga sependapat dengan hal tersebut. “Masing-masing *batch* malah masih dijadwal per seksi/bagian, sehingga server

memiliki kecepatan internet yang stabil. “Sehingga beberapa kali sempat gagal koneksi dan mengulang dari awal,” tutur pegawai pajak ini.

Mirip dengan Nasrul, salah satu pegawai bea cukai yang bernama Widias Nugroho Saputro juga menyampaikan pendapatnya terkait kendala jaringan internet. Pegawai yang berkantor di Sekretariat DJBC ini berharap agar terdapat penyesuaian yang lebih baik pada saat mengakses KLC melalui *smartphone*. Terlebih, Widias memperoleh waktu dari kantor untuk mengerjakan *e-learning* saat sedang bertugas di lapangan. “Mempertimbangkan pula pegawai yang

tata cara beretika dan berdisiplin bagi PNS. “*E-learning* ini sangat bagus, sangat sesuai dengan kondisi saat ini yang serba digital,” ujar pegawai Kanwil DJPB Provinsi Aceh ini. Menurutnya, materi kode etik dan kode prilaku ini sangat bagus untuk para pegawai Kemenkeu dalam rangka meningkatkan kesadaran sebagai seorang PNS. Sehingga mereka dapat membedakan mana yang harus dilaksanakan dan mana yang harus di jauhi. “Itu semua bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat seorang ASN,” tambah Barry.

Seirama dengan Barry, salah seorang pegawai Kanwil DJP Jawa Timur

Secara umum, para peserta merasa sangat terfasilitasi dengan adanya pembagian batch sehingga dapat mengerjakan e-learning secara maksimal.

tidak membludak saat pegawai kantor mengerjakan *e-learning*,” jelas pegawai KPP Pratama Lubuk Linggau ini. Secara umum, para peserta merasa sangat terfasilitasi dengan adanya pembagian *batch* sehingga dapat mengerjakan *e-learning* secara maksimal.

KEKUATAN JARINGAN INTERNET BERBEDA DI BEBERAPA WILAYAH

Dalam mengerjakan *e-learning*, para peserta membutuhkan koneksi jaringan internet yang stabil dan memadai. Namun, tidak semua wilayah unit instansi telah memenuhi persyaratan tersebut. Kekuatan sinyal atau jaringan internet yang digunakan peserta seringkali berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Seperti yang dialami oleh Muhammad Nasrul Sani, pegawai Kanwil DJP Kalimantan Barat. Menurut Nasrul, aplikasi KLC cukup berat untuk diputar di daerah tertentu yang masih belum

bertugas di lapangan, tidak ada komputer maupun laptop, dan koneksi internet yang ada sangat terbatas sehingga kecepatan aksesnya kurang,” ungkap Widias. Untuk menyalahi hal ini, Widias juga berharap agar konten-konten berupa video dapat diputar dengan berbagai pilihan kualitas *stream* seperti pada YouTube.

PEMBELAJARAN MODERN UNTUK BERETIKA DAN BERDISIPLIN

Sebagian besar peserta menilai penyelenggaraan *e-Learning* Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu ini telah berjalan dengan baik. Mereka memberi *rating* rata-rata 4 hingga 5 dari maksimal 5 bintang dalam kolom penilaian ketika selesai mengerjakan *course*. Salah satu peserta yang memberi *rating* 5, Barry Dharmawan, mengatakan bahwa *e-learning* ini merupakan wujud dari pembelajaran modern untuk memberikan pemahaman mengenai

III bernama Eka Nurlita Kurnia Wardhani menyampaikan kepuasannya atas digitalisasi pembelajaran yang dirasakannya saat mengikuti *e-learning* ini. Eka berharap, kemudahan dan keterbukaan akses dalam *e-learning* dapat semakin membantu para pegawai Kemenkeu untuk memperkaya ilmu dan pengetahuannya. “Terima kasih telah memberikan kami kesempatan dan kemudahan untuk dapat selalu memperbarui pengetahuan dan informasi melalui media ini,” ujar Eka.

Jadi, bagaimana pengalamanmu setelah mengikuti e-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku PNS Kemenkeu ini?



ACHMAD ZUNAIDI DAN LUTHFI NURDIANSYAH

TANTANGAN MENJADI JFAA

Direktorat Jenderal Anggaran bekerja sama dan bersinergi dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK telah menyusun Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA). JFAA adalah jabatan yang memiliki lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen pengelola perekonomian negara. Secara ideal, tujuannya adalah mengubah kondisi rakyat menjadi lebih baik: pengangguran turun, daya beli naik, dan tidak ada utang.

Proses penyusunan APBN membutuhkan perhitungan yang cermat sebagai hasil koordinasi, diskusi, serta analisis. Dapat dikatakan, proses penyusunan

APBN merupakan hasil kolaborasi seluruh birokrasi pemerintahan. Sebab, semua instansi membutuhkan anggaran bagi kelangsungan hidup birokrasi. Tidak sekadar hidup, birokrasi juga memerlukan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik.

Tentu wajar, proses penyusunan APBN membutuhkan pegawai yang kompeten dalam menghitung



FOTO: ENDY

Focus Group Discussion Pusdiklat AP dengan DJA membahas Finalisasi Kurikulum JFAA dan Penyusunan Tools Uji Kompetensi, 9 Mei 2019

dan memproyeksikan angka-angka yang diyakini validitasnya. Angka-angka dalam APBN bukan sekadar angka tanpa makna tetapi mempunyai tujuan tertentu yang akan mempengaruhi kehidupan ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta. Oleh karena itu, angka-angka dalam APBN sering menjadi bahan analisis para ekonom dan dibicarakan banyak orang yang terpengaruh dari kebijakan pemerintah yang berwujud APBN.

Dalam proses penyusunan APBN, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dalam perumusan kebijakan terkait pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran merupakan keharusan. Dua alasan penting berikut ini merupakan jawabannya.

Pertama, ruang lingkup penganggaran yang kompleks memerlukan keahlian spesialisasi tertentu. Contoh dalam satu komponen APBN, karakter pendapatan negara dari sektor perpajakan berbeda dengan pendapatan dari PNPB. Contoh lain dalam komponen belanja, kebutuhan belanja untuk sektor pendidikan dan

kesehatan pasti berbeda, baik dari cara menilai kebutuhannya maupun cara memproyeksikannya.

Kedua, pertumbuhan anggaran negara (APBN) sangat cepat. Belanja negara pada APBN tahun 2010 hanya sebesar Rp1.042 triliun dan pada APBN tahun 2017 telah menjadi sebesar Rp2.081 triliun. Nilainya melonjak mendekati dua kali lipat dari nilai semula dalam waktu 7 tahun. Sementara nilai pendapatan negara pada APBN tahun 2010 hanya Rp995 triliun dan pada APBN tahun 2017 menjadi Rp1.750 triliun. Pertumbuhan yang cepat dan nilainya signifikan tersebut mengundang banyak pertanyaan bagi pembayar pajak: apakah belanja sebesar itu digunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Atas dasar kondisi di atas, Direktorat Jenderal Anggaran bekerja sama dan bersinergi dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK telah menyusun Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (JFAA) sebagai jawabannya (Peraturan Menteri Keuangan nomor

103/PMK.02/2017 tentang Standar Dan Uji Kompetensi Serta Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Anggaran). JFAA adalah jabatan yang memiliki lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN. JFAA juga merupakan jabatan fungsional dengan kategori keahlian pada rumpun akuntan dan anggaran yang mempunyai 4 jenjang: analisis anggaran pertama, analisis anggaran muda, analisis anggaran madya, dan analisis anggaran utama.

Kondisi yang diinginkan dengan adanya JFAA adalah peningkatan kualitas proses penganggaran. Caranya melalui beberapa upaya sebagai berikut:

1. Adanya kedalaman analisis di tingkat *outcome* atau dampaknya terhadap masyarakat

Analisis anggaran tidak hanya sekadar meneliti realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Yang paling utama, apakah anggaran yang akan dialokasikan berdampak kepada



FOTO: LUTHFI

Pembukaan Pelatihan JFAA Ahli Madya Angkatan I, 15 Juli 2019

masyarakat atau hanya sekadar pembelanjaan semata.

2. Penurunan gap pengetahuan penganggaran antara Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga sehingga koordinasi menjadi lebih optimal
Tidak dapat dipungkiri, pengetahuan dan kemampuan bidang penganggaran antara pegawai Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga mempunyai jarak yang jauh. Adanya JFAA (tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran) yang tersebar di kementerian/lembaga membuka ruang diskusi atas anggaran yang berkualitas dengan ciri cukup dan layak dalam mendukung program/kegiatan prioritas nasional yang ada pada kementerian/lembaga bersangkutan.

3. Peningkatan profesionalisme dan mengurangi politisasi proses penganggaran
Dengan pengetahuan dan kemampuan penganggaran baik di Kementerian

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran maupun di kementerian/lembaga, diharapkan politisasi pengalokasian anggaran berkurang. Yang muncul adalah sikap kritis berdasarkan analisis cermat dan mendalam atas suatu alokasi anggaran.

4. Peningkatan motivasi dan kepuasan kerja pegawai

Persyaratan dan penugasan JFAA tentu saja telah diperhitungkan dengan kompensasi yang akan diterima bagi pegawai yang layak. Memang persyaratan untuk menjadi JFAA lumayan berat dan penugasan juga penugasan-penugasan yang diberikan kepadanya. Namun, kompensasinya berupa peningkatan grade dapat dikatakan seimbang.

Hasil akhirnya adalah APBN menjadi lebih baik. Indikatornya antara lain berupa: Meningkatnya ruang fiskal, kualitas *review* prakiraan maju dan penilaian usulan kebijakan/program/kegiatan baru, dan kebijakan fiskal yang selaras kebijakan makro. Adanya ruang

Pelaksanaan Uji Kompetensi Tahap 2 yaitu Wawancara dengan asesor, 9 Agustus 2019



Wawancara tiap peserta dengan 3 orang asesor selama kurang lebih 60 menit, 9 Agustus 2019



Pelaksanaan Uji Kompetensi Tahap 1 yaitu Ujian Tertulis, 8 Agustus 2019

FOTO: ENDY

fiskal yang meningkat, pemerintah dapat memberikan anggaran belanja yang lebih besar kepada sektor-sektor yang mengubah perekonomian masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kualitas review perkiraan maju dapat dipedomani dalam perencanaan anggaran untuk beberapa tahun yang akan datang dan hal tersebut memudahkan dalam proyeksi kebutuhan anggaran pada sektor-sektor prioritas. Dengan berbagai upaya teknis tersebut, kebijakan fiskal dapat selaras antara kebijakan fiskal (pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran) dengan kebijakan makro, seperti kondisi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang diharapkan.

Untuk memenuhi kebutuhan Pejabat Fungsional Analis Anggaran, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah menyelenggarakan Pelatihan

1. Analisis operasional, terdiri dari review baseline K/L, Profile belanja satker/kementerian atau lembaga, analisis sederhana bersifat operasional, dan Kompilasi data/olah data.
2. Analisis kompleks, berupa analisis efisiensi alokasi per bidang terhadap pencapaian output/ outcome, dan analisis dampak makro per sektor/ jenis belanja.
3. Analisis strategis, yaitu rekomendasi kebijakan alokasi anggaran nasional.

Pelatihan tersebut diikuti oleh 25 orang peserta yang seluruhnya berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran. Dari pelatihan tersebut, peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 24 orang dan akan mengikuti proses selanjutnya, yaitu uji kompetensi sertifikasi. Uji kompetensi bagi 24 orang peserta telah dilaksanakan pada 8-9 Agustus 2019 melalui 2 tahap, yaitu uji tertulis dan wawancara oleh

Untuk meningkatkan kompetensi teknis, bentuk pengajaran dilakukan melalui transfer knowledge dan pengalaman pengajar/narasumber.

Penjenjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda pada 15-26 Juli 2019. Dalam pelatihan penjenjangan tersebut, ada 3 standar kompetensi yang hendak dituju, yaitu Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural. Untuk kompetensi manajerial, saat ini digunakan hasil laporan *individual assessment center*. Sementara untuk kemampuan sosiokultural, peserta dilatih mengemukakan argumen secara runtut dan logis dengan berbagai alat dan metode.

Untuk meningkatkan kompetensi teknis, bentuk pengajaran dilakukan melalui transfer *knowledge* dan pengalaman pengajar/narasumber. Selain itu, peserta pelatihan dilatih melakukan berbagai analisis anggaran dalam bentuk presentasi. Bentuk-bentuk analisis tersebut diantaranya:

asesor. Materi uji tertulis berupa pilihan ganda dan studi kasus. Tahap kedua berupa wawancara dengan 15 orang asesor dari BPPK dan DJA. Masing-masing peserta diuji oleh 3 orang asesor dalam waktu kurang lebih 60 menit. Peserta yang lulus uji kompetensi ini akan mendapatkan sertifikasi jabatan fungsional.

Nantinya, peserta yang telah mendapat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pemerintah Pusat mampu memberikan rekomendasi, baik secara operasional maupun strategis. Landasan yang digunakan adalah analisis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada jabatan pimpinan atau pejabat struktural sebagai bahan pengambilan keputusan. Semoga.



DODI SEPTARIZA

JUNAEDI PURNOMO

Konsistensinya untuk terus belajar dan memperbaiki diri, mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Pun ketika berkecimpung di dunia profesional, ketekunan dan keseriusannya dalam bekerja senantiasa dilandasi niat yang tulus dan ikhlas untuk membangun negeri. Predikat terbaik dari dua institusi di waktu dan tempat yang berbeda adalah secuil bukti dari bakti seorang Junaedi Purnomo.

WIDYAISWARA BERPRESTASI NASIONAL 2019

BUKAN PINTAR, TAPI RAJIN!

Anak kelima dari tujuh bersaudara ini lahir di Klaten tahun 1974 dan menikmati masa kecilnya di desa yang jauh dari perkotaan. Di sekolah, Jun kecil dikenal sebagai anak yang rajin dan gigih dalam belajar, maka tidak heran dirinya selalu menjadi juara kelas di SD dan SMP. Ia juga terlibat dalam lomba antar sekolah SD dan SMP dengan menyumbangkan piala untuk sekolahnya. Jun kecil lebih senang menghabiskan waktu luangnya untuk belajar atau membaca buku, bahkan pada saat bermain bersama teman-temannya, tak jarang ia menyelipkan buku di balik bajunya. Tidak hanya itu saja, dirinya juga kadang diajak tetangganya yang kuliah kedokteran untuk belajar di kuburan sambil menggelar tikar, "Saya sekarang juga bingung kenapa dulu saya lakukan, bahkan pernah ditinggal pulang sementara saya ketiduran," canda Junaedi.

Ketekunannya dalam belajar ternyata timbul dari kesadaran sendiri, Jun pun tidak setuju jika ada orang yang bilang bahwa dirinya pintar, baginya dia hanyalah seorang anak yang rajin, untuk menjadi rajin itu semua orang bisa, asalkan mempunyai kemauan.

Sifat rajin yang dilakukan selama SMP berbuah manis, ia memperoleh Nilai Evaluasi Tahap Akhir Nasional Murni (NEM) tertinggi kedua se-Klaten. Selepas SMP ia masuk SMAN 1 Klaten, disini ia menemui tantangan yang sebenarnya, yang memaksanya untuk hidup lebih mandiri. Satu tahun dijalani dengan pulang pergi naik sepeda. Saat kelas 2 dan 3 SMA dirinya memutuskan untuk kos dekat sekolah, karena penjurusan ke fisika (A1) mendorongnya untuk lebih giat dalam belajar. Momen seru saat SMA adalah ketika ia merasakan sensasi mendapat "uang" sendiri dengan "menjual" hadiah *try out* berupa gratis bimbingan belajar selama 1 tahun kepada temannya, kebetulan ia mendapat juara 1 saat *try out* itu.

Dengan tekad yang kuat, Jun berhasil menyelesaikan sekolah di SMA dengan baik dan berhasil diterima di dua kampus favorit, yaitu Fakultas Teknik Elektro Universitas Gajah Mada dan DIII Akuntansi STAN. STAN menjadi pilihannya karena dorongan dan harapan dari orang tuanya yang murni wiraswasta. Pergolakan memilih tempat kuliah baginya sangat berat, antara idealisme saat SMA dan keinginan orang tua. Jun yakin bahwa "Orang Tua adalah segala-galanya, ia telah berjuang luar biasa untuk anak-anaknya, walaupun seisi dunia kita berikan kepada mereka, hal itu tetap tidak akan bisa membalas apa yang orang tua berikan dan lakukan untuk kita," ujarnya.

PETUALANGAN KARIR DI DJP

Setelah lulus dari DIII Akuntansi ia mendapatkan takdir mengabdikan di DJP, padahal pada saat diberikan pilihan instansi, dari 14 instansi ia hanya memilih 6 instansi dan pajak ditempatkannya di nomor 6. Hal ini bukan tanpa alasan, Pada awal kuliah, Jun mengaku tidak punya

niat untuk bekerja di kantor pajak. Hal ini disebabkan persepsi buruk yang didapat saat SMA. "Saya ingat sekali waktu masih SMA ada senior yang datang ke sekolah dan memperkenalkan jurusan di STAN termasuk pajak dan ia cerita kalau nanti ditempatkan di pajak, lalu ke lokasi Wajib Pajak dengan bawa mobil butut untuk melakukan pemeriksaan, ketika pulang mobil butut itu pasti sudah digantikan yang baru oleh Wajib Pajaknya, bayangkan coba, hal buruk tersebut sudah diceritakan di SMA! Meskipun dalam kenyataannya mana ada seperti itu," tegas Jun.

Takdir berkata lain, walau awalnya tidak ingin bekerja di DJP, Jun justru ditempatkan di tempat yang ia letakkan di pilihan terakhir, meskipun pada saat pemilihan instansi, Indeks Prestasinya diatas 3,5. Takdir itu ia terima dan menyakininya inilah institusi yang Tuhan berikan kepadanya untuk mengabdikan. Penempatan pertama ia jalani sebagai pelaksana di Kantor Pajak Cirebon. Takdir mempertemukannya dengan



“Saya kaget, karena baru kerja satu tahun, dan penilaiannya itu bukan hanya kinerja, tetapi juga dari voting pegawai, saya tidak mengira teman-teman memilih saya.”

atasan yang juga satu SMA dengannya di Klaten. Ia ditempatkan di Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa yang lebih banyak mengurus pekerjaan klerikal. Pada saat penempatan tersebut, ia tetap rajin untuk belajar, selain untuk menambah pengetahuan dan kompetensinya, juga sebagai persiapan diri untuk mengikuti seleksi melanjutkan pendidikan D4 STAN dan kegigihannya mengantarkan Jun lolos seleksi pada kesempatan pertama.

Selepas D4, ia dipercaya dengan 10 orang lulusan D4 STAN untuk bergabung dalam kantor modern pertama DJP saat itu LTO (*large taxpayers offices*) di tahun 2002. LTO merupakan kantor pajak percontohan yang dibentuk melalui *open recruitment* SDM terbaik DJP dari seluruh Indonesia, Jun menikmati betul tugasnya sebagai staf yang membantu proses administrasi pemeriksaan dan berinteraksi dengan fungsional-fungsional handal yang masuk LTO. Kompetensi Jun terkait teknis pemeriksaan semakin meningkat dengan dilibatkan lebih besar dalam membantu fungsional pemeriksa pajak sehingga mampu memahami dan mendeteksi temuan pemeriksaan dan tentunya tidak menyalahkan belajar

dan menerapkan ACL (*Audit Command Language*) sebagai *tools* pemeriksaan saat itu.

Empat tahun sebagai staf pemeriksa di LTO, Jun mengikuti tes AR (*Account Representative*), dan kantor pertama Jun sebagai AR adalah KPP Pratama Menteng Tiga. Pada saat sebagai AR itulah, Wajib Pajak lebih suka memanggilnya dengan sebutan AR Jun. Tiga tahun kemudian dirinya dimutasi sebagai AR di KPP Penanaman Modal Dua pada tahun 2009 dan selanjutnya di KPP Surakarta.

Sebagai AR di KPP Pratama Surakarta terasa begitu spesial, karena pada saat itu, ia berhasil terpilih sebagai AR terbaik KPP Pratama Surakarta. Jun begitu merasa tersanjung bisa dipilih sebagai yang terbaik walaupun dirinya tergolong anak baru di kantor tersebut. “Saya kaget, karena baru kerja satu tahun, dan penilaiannya itu bukan hanya kinerja, tetapi juga dari *voting* pegawai, saya tidak mengira teman-teman memilih saya.” Pada kompetisi AR terbaik tingkat Kanwil Jawa Tengah II, lagi-lagi ia terpilih sebagai peringkat pertama AR Terbaik Jawa Tengah II. “Lumayan lah dapat kenang-kenangan dan apresiasi langsung dari

Dirjen Pajak, diberi apresiasi jalan-jalan lalu dapat uang juga, hehe,” kenangnya. Junaedi sempat ditarik ke Kanwil Jawa Tengah II bertugas sebagai Penelaah Keberatan. Belum genap 1 tahun bekerja, Jun mendapatkan promosi sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, KPP Pratama Praya, Lombok dan pada tahun 2013 menjadi kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

Selain sebagai fiskus, ayah dari tiga orang anak ini juga *trainer* di Kementerian Keuangan dalam Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) di 2007-2009 dan kadang juga diminta bantuan mengajar di Pusdiklat Pajak, BPPK. Dari pengalamannya itu, Junaedi menikmati sebagai seorang pengajar, bertemu banyak orang baru dan juga menjelajahi kota-kota nusantara ia dapati saat menjadi *trainer* PPAKP. Keinginan untuk beralih profesi sebagai widyaiswara pun mulai muncul dan direalisasikan dalam seleksi tahun 2013. Pengabdian pertama sebagai widyaiswara ia jalani di Pusdiklat Pajak 2014-2018 dan mutasi ke BDK Yogyakarta hingga saat ini.

SUARA KEBENARAN

Widyaiswara adalah sebuah profesi baru bagi seorang Junaedi, “Terus terang ketika mendaftar seleksi widyaiswara, saya banyak mencari tahu. Widyaiswara itu secara harafiah artinya adalah suara kebenaran, tetapi bagi saya, widyaiswara itu tidak hanya cukup suara kebenaran. Widyaiswara itu harus benar dan kompeten. Ia harus punya *knowledge*, punya *skill* dan punya *altitude* yang baik. Karena kalau kita tidak memiliki itu, kita tidak bisa menyampaikan hal yang substansial dengan baik.”

Nilai-nilai tersebut yang terus dipegang dan coba diterapkannya, ia senantiasa *meg-update* diri dan mengikuti perkembangan informasi. Dari teknis terkait perpajakan ia tidak terpaku dengan bekal pengetahuan yang dimilikinya saat bertugas di DJP, tapi terus mengikuti perkembangan yang terjadi di DJP saat ini dengan mengajak teman-teman di CTA (*Centre Tax Analyst*) sebagai *patner* mengajar, terlibat dalam *Community of Practice* teman-teman DJP dan komunitas lainnya.

Junaedi juga tidak menutup mata akan kemungkinan banyak peran widyaiswara yang diganti teknologi. Namun dirinya yakin, widyaiswara masih akan terus dibutuhkan selama bisa beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0 saat ini. Dirinya berpendapat, “Widyaiswara itu harus bisa memaksimalkan peran perkonsultasian. Saya beruntung organisasi bisa merespon perkembangan teknologi dengan memfasilitasi widyaiswara belajar desain multimedia, *storyboard* dan sejenisnya.” Peran konsultasi kepada peserta pelatihan juga lah yang membawanya terpilih sebagai peringkat 1 Widyaiswara Berprestasi Tingkat Nasional 2019. Model pembelajaran yang menitikberatkan peran widyaiswara di 10 % di *structure learning* dan desain pembelajaran, video untuk *self learning*, peran di 20 % dalam memberikan *sukses story* selama bekerja di Pajak serta peran di 70 % dalam membantu peserta dalam memberikan konsultasi teknis menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi pekerjaan sehari-hari.

KERJAKAN SAJA! SEMUA PASTI ADA HIKMAHNYA

Junaedi mengaku pada awalnya ia tidak terlalu memberi perhatian atas program Widyaiswara Berprestasi Tingkat Nasional 2019 yang diselenggarakan LAN, sampai akhirnya diberitahu pimpinan BDK Yogyakarta, bahwa berdasarkan pertimbangan pimpinan, dirinya dipilih menjadi wakil BDK Yogyakarta pada program tersebut.

Pada program tersebut, setiap peserta diminta membuat dua tulisan. Tulisan yang pertama berisikan pengalaman *best practice* yang dilakukan dalam kurun waktu dua tahun terakhir dan tulisan kedua adalah sebuah Karya Tulis Ilmiah. Di kesempatan itu, Junaedi membuat 2 buah tulisan yang berjudul “*Best Practice Implementasi pembelajaran model 70-20-10 berbasis Kementerian Keuangan Corporate University di era transformasi teknologi*” dan “*Persepsi Peserta Atas Peralihan Metode Pembelajaran DTSS Account Representative Dasar di Era Disruptive Technology*”.

Keberhasilannya dalam ajang tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak di BPPK. Sinergi yang baik antara Pimpinan BDK Yogyakarta pada saat itu, Ibu Iin dan Kepala Kantor Wiyah DJP Jawa Tengah II, Bapak Ridha. Sinergi yang luar biasa dari Pimpinan, staff dan tentunya widyaiswara lain di BDK Yogyakarta membuat kegiatan implementasi dan pertemuan *CoP Gathering* dan sejenisnya dapat diselenggarakan dengan baik dan bermanfaat untuk memetakan secara riil hasil pembelajaran para pegawai DJP di wilayah tersebut.

Dukungan Pimpinan BPPK ia rasakan saat dirinya masuk dalam delapan widyaiswara yang diuji di fase presentasi makalah melalui *video conference* panitia pusat BPPK, yang digawangi tiga orang pejabat Eselon II BPPK. Banyak masukan yang berharga dalam memperkaya tulisannya. “Saya sangat terkesan dengan keseriusan BPPK diajang tersebut, dimana saya ditanya oleh Kepala Pusdiklat PSDM,

Kepala Pusdiklat Pajak dan Kepala Pusdiklat BC. Di kesempatan itu materi saya betul-betul dibedah, Pak Hario menyampaikan *concern* dari sisi *outcome*, dimana beliau menyampaikan *outcome*-nya harus sampai ke penerimaan pajak. Pak Anies pun juga tidak kalah kritis mempertanyakan sejauh mana peran dalam *best practice* tersebut, sementara Pak Harry menyampaikan masukan cerdas terkait teknis menyajikan makalah presentasi dihadapan LAN agar bisa menang, “Jangan terlalu banyak istilah teknis, angkat ke level yang lebih besar,” cerita Jun.

Lagi-lagi ia tak menyangka masuk dalam 4 widyaiswara yang menjadi wakil Kementerian Keuangan yang dikirim ke LAN dalam ajang tersebut. Junaedi merasa sangat bersyukur, BPPK lagi-lagi memberi perhatian serius dengan memberikan pendampingan perbaikan melalui Kepala Pusdiklat Pajak, Bapak Hario Damar agar nantinya dapat disajikan dengan baik dan jelas *outcome*-nya.

Junaedi Purnomo sama sekali tidak menyangka akan menyabet peringkat satu dalam ajang tersebut. Baginya di BPPK banyak widyaiswara yang lebih hebat, namun saat ini ia yang diberi kesempatan tampil. Berbagai bentuk pujian, penghargaan dan predikat terbaik yang diperoleh Junaedi hanyalah sebuah bonus semata “Efek samping,” ujarnya. Baginya, bekerja adalah bagian dari ibadah, apapun pekerjaan yang diberikan kepadanya, selama itu tidak bertentangan dengan integritas dan keyakinannya, Junaedi akan siap melaksanakannya. “Kerjakan saja! Semua pasti ada hikmahnya, hasil itu datang dengan sendirinya mengikuti proses yang kita lakukan, proses yang baik yakinlah hasil akan juga baik, maka lakukan dengan sepenuh hati,” tutup Junaedi.

Serambi Ilmu

EDY PURWANTO
PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

MEMPRODUKSI ROKOK TANPA MEMILIKI IZIN

Edy Purwanto

MEMPRODUKSI ROKOK
TANPA MEMILIKI IZIN

Daniel Pangaribuan

BAGAIMANA PENGARUH
KORUPSI TERHADAP
OPINI ATAS LAPORAN
KEUANGAN INSTANSI
PEMERINTAH?

Eri Hariyanto

PERAN TREASURY
MANAGEMENT
DALAM MEWUJUDKAN
KESINAMBUNGAN FISKAL

LATAR BELAKANG

Penindakan atas pelanggaran di bidang cukai yang sering kali ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai adalah adanya rokok tanpa pita cukai maupun rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam berbagai kasus yang terjadi baik yang berdiri sendiri maupun hasil pengembangan penyelidikan, petugas Bea dan Cukai menemukan bahwa rokok tersebut diproduksi oleh pabrik yang tidak memiliki izin yang sesuai, yaitu rokok jenis Sigaret Kretek Mesin dibuat oleh pabrik yang tidak mempunyai izin membuat Sigaret Kretek Mesin. Sebagai ilustrasi, suatu ketika petugas Bea dan Cukai dari sebuah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) menemukan adanya Barang Kena Cukai (BKC) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada sebuah pabrik yang memiliki izin hanya untuk memproduksi rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT). Rokok ditemukan ada yang sudah dalam kemasan untuk penjualan eceran dalam jumlah belasan ribu bungkus dan ada yang masih dalam keadaan berupa batangan dalam jumlah ratusan ribu barang. Sementara itu di dalam pabrik tersebut tidak ditemukan adanya mesin untuk membuat SKM. Petugas Bea dan Cukai juga mendapati bahwa yang menjalankan kegiatan pabrik bukanlah pemegang izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) namun sudah mendapatkan surat kuasa dari

pemegang NPPBKC dan hal tersebut telah diberitahukan kepada KPPBC yang mengawasi.

Pengungkapan kasus seperti di atas atau yang sejenis membutuhkan kecermatan dalam melakukan analisis atas pelanggaran yang terjadi. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan untuk membuktikan adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1996 tentang Cukai (Undang-Undang Cukai) harus dilakukan secara cermat sehingga penanganan kasusnya akan tepat.

IDENTIFIKASI MASALAH

Setiap penindakan oleh petugas Bea Cukai apalagi jika dilanjutkan ke pengadilan haruslah memiliki dasar yang kuat dan meyakinkan. Pengenaan pasal pelanggaran atas undang-undang harus dilakukan dengan tepat. Kesalahan atau ketidaktepatan pengenaan pasal pelanggaran berakibat tidak hanya gagalnya proses penyelidikan dan penyidikan namun juga berarti lemahnya penegakan hukum atas kasus yang terjadi. Pengenaan sanksi baik administrasi maupun pidana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku harus tepat dasar hukumnya. Disamping itu, petugas Bea dan Cukai juga perlu untuk mengungkap apakah telah terjadi kerugian negara. Artikel ini membahas pasal-pasal dalam Undang-Undang Cukai yang dapat dikenakan atas proses penyelidikan dan

penyidikan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara tepat.

PEMBAHASAN

Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik barang kena cukai harus mempunyai izin dari Menteri Keuangan berupa NPPBKC sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Sementara itu yang dimaksud dengan pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. Pengusaha pabrik yang mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan NPPBKC sudah harus mencantumkan jenis BKC yang akan dibuatnya. Jika nanti terdapat perubahan jenis BKC yang dibuatnya maka pengusaha wajib mengajukan perubahan izin NPPBKC yang dimilikinya. Pasal 30 Undang-undang Cukai mengatur bahwa di dalam Pabrik dilarang menghasilkan barang selain BKC yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan.

Ketentuan pidana yang terkait dengan pengusaha pabrik dalam Undang-undang Cukai mengatur beberapa kegiatan yang diancam dengan pidana, yaitu :

1. Pasal 50 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

2. Pasal 52 mengatur bahwa pengusaha pabrik yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
3. Pasal 54 mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
4. Pasal 55 mengatur bahwa Setiap orang yang:
 - a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
 - b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
 - c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan,

menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,

- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
5. Pasal 56 mengatur bahwa Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
 6. Pasal 58 mengatur bahwa Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penulis ketika ditugaskan menjadi Ahli di proses penyidikan maupun persidangan di pengadilan, beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan kejadian yang dibahas dalam artikel ini yaitu ditemukannya produk BKC berupa SKM di dalam pabrik yang mempunyai izin untuk memproduksi SKT baik yang sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan masih dalam bentuk batangan sementara pabrik tersebut tidak memiliki mesin

untuk memproduksi SKM adalah sebagai berikut :

1. Pasal 50, karena yang bersangkutan kedapatan melakukan pembuatan atau pengemasan BKC berupa SKM tanpa memiliki izin. Jika dilihat dari definisi pabrik sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, maka kegiatan yang ada di pabrik adalah menghasilkan BKC (memproduksi) dan/atau kegiatan mengemas BKC. Ketika di dalam pabrik tidak ditemukan adanya mesin untuk membuat SKM maka dalam hal ini yang bersangkutan patut diduga setidaknya melakukan pengemasan BKC berupa SKM di dalam pabriknya. Kegiatan pengemasan BKC berupa SKM termasuk dalam menjalankan kegiatan pabrik dan dalam konteks kasus ini dilakukan tanpa memiliki izin, mengingat izin yang bersangkutan adalah memproduksi BKC berupa SKT.
2. Pasal 56, karena yang bersangkutan kedapatan menyimpan, memiliki, memperoleh BKC yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasar Undang-Undang Cukai. Tindak pidana yang seharusnya diketahuinya atau diduga adalah adanya pihak lain yang mengeluarkan BKC berupa SKM dari pabriknya ke pabrik yang bersangkutan tanpa dilekati pita cukai atau dokumen cukai lainnya yang sah. Pengeluaran oleh pihak lain tersebut sendiri patut harus diduga merupakan pelanggaran pidana di bidang cukai sesuai pasal 52 dan/atau pasal 54. Pasal 29 Undang-Undang Cukai mengatur bahwa pengeluaran BKC dari pabrik hanya dapat dilakukan dengan cara melunasi cukai yang diwajibkan dengan cara pelekatan pita cukai atau tanda pelunasan lainnya.
3. Belum terjadi kerugian negara yang diakibatkan oleh yang bersangkutan karena BKC masih berada di dalam pabrik. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang Undang Cukai dan penjelasannya dinyatakan bahwa pelunasan BKC dilakukan pada

saat pengeluaran BKC dari pabrik, namun karena saat terutangnya sudah terpenuhi yaitu saat selesai dibuat, maka dapat diperhitungkan besarnya potensi kerugian negara. Kerugian negara dapat dinyatakan telah terjadi apabila BKC telah berada di luar pabrik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan atas kondisi yang ditemukan Pejabat Bea dan Cukai dalam pengawasan yang dilakukannya maka dapat disimpulkan bahwa :

Penanggung jawab pabrik dalam menjalankan kegiatan usaha pabrik telah mendapat surat kuasa dari pemegang NPPBKC. Izin NPPBKC yang dimiliki adalah untuk memproduksi BKC berupa SKT dan pengusaha pabrik yang bersangkutan belum mengajukan perubahan NPPBKC untuk menghasilkan BKC berupa SKM.

Penanggung jawab pabrik telah melakukan pelanggaran pasal 50 dan pasal 56 Undang-undang Cukai, karena kedapatan adanya BKC berupa SKM di dalam pabriknya.

Belum terjadi kerugian negara atas kejadian ini karena BKC berupa SKM tersebut masih berada di dalam pabrik. Kerugian negara dapat dinyatakan telah terjadi apabila BKC telah dikeluarkan dari pabrik.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penerapan pasal dalam proses penyidikan dan penyelidikan atas kasus serupa, penulis merekomendasikan :

Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih massif agar kasus serupa tidak terulang lagi.

Proses pemberian izin NPPBKC perlu dilakukan dengan model “jemput bola” atau petugas yang melakukan sosialisasi juga memetakan potensi pelanggaran dan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar jangan sampai melakukan pelanggaran

Penegakan hukum dilakukan tanpa memperhitungkan besarnya kerugian negara agar ada efek jera bagi para pelaku pelanggaran.

DANIEL PANGARIBUAN
PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAGAIMANA PENGARUH KORUPSI TERHADAP OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH?

ABSTRAK

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan apabila suatu laporan keuangan telah memenuhi lima kondisi yang dipersyaratkan. Apakah di dalam kelima syarat tersebut termasuk syarat bebas korupsi? Sebagian akuntan berpendapat bahwa entitas yang di dalamnya terjadi korupsi, laporan keuangannya tidak layak untuk mendapatkan WTP. Sebagian lagi berpendapat sebaliknya. Masyarakat pada umumnya memahami WTP sebagai laporan keuangan yang bebas dari korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Audit, Auditor, Opini, Tanggung jawab, Materialitas, Skeptisme yang Profesional.

Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban keuangan yang diterima secara sah baik dalam organisasi swasta yang mencari laba maupun organisasi pemerintah yang tidak bertujuan mencari laba. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal

56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pertanyaan yang muncul dalam audit laporan keuangan adalah, apakah korupsi memengaruhi kewajaran laporan keuangan suatu instansi pemerintah? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengaruh korupsi terhadap opini auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut?

WTP DAN KORUPSI

Persyaratan atau kondisi untuk opini WTP dan opini lainnya sebenarnya sudah diatur dalam standar audit profesi. Standar audit tersebut menyebutkan bahwa laporan keuangan entitas layak memperoleh WTP apabila memenuhi lima kondisi. Pertama, entitas sudah

menyusun seluruh laporan keuangan; kedua, auditor mematuhi seluruh standar audit; ketiga, auditor telah mengumpulkan bukti yang cukup dan kompeten; keempat, entitas sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi; kelima, tidak terdapat kondisi yang mengharuskan tambahan penjelasan dan modifikasi dalam laporan audit.

Secara sederhana WTP diberikan apabila laporan keuangannya wajar dan auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar audit.

Laporan keuangan disebut wajar apabila disusun berdasarkan bukti-bukti yang kompeten dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Bukti yang kompeten dan disusun sesuai standar akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang wajar. Sebaliknya, kalau

bukti tidak kompeten walaupun disusun sesuai dengan standar akuntansi, tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang wajar. Di sini berlaku istilah *garbage in garbage out* (kalau yang masuk sampah keluarannya juga sampah).

LALU, BAGAIMANA PENGARUH KORUPSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN?

Jenis korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang, dan Gratifikasi. Dalam tulisan ini, lingkup korupsi yang dimaksud dibatasi pada korupsi dari APBN atau APBD yang menyebabkan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Dalam hubungannya dengan laporan keuangan, Arens (2010) membedakan Korupsi, yaitu mencuri asset (*misappropriation of asset*) dan menyusun laporan keuangan yang menyesatkan atau kelihatannya bagus padahal bohong (*fraudulent financial reporting*). Tujuan penyusunan laporan keuangan yang mengandung kebohongan adalah untuk mendapatkan keuntungan (*benefit*) tambahan dengan menipu pembaca agar kelihatan berkinerja baik. Untuk membongkar kebohongan itulah BPK perlu mengaudit laporan keuangan entitas. Dua contoh Ilustrasi kasus berikut ini menjelaskan pengaruh korupsi terhadap laporan keuangan.

Pertama, kasus perjalanan dinas fiktif (pernah diungkap oleh BPK). Dalam kasus ini terjadi pencurian uang dengan menerbitkan bukti-bukti perjalanan dinas palsu (faktanya pegawai yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan dinas). Bukti palsu ini selanjutnya dipakai sebagai bahan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang terpengaruh adalah neraca, laporan

realisasi anggaran dan laporan arus kas. Dengan sendirinya akun yang terkait pada laporan keuangan tersebut menjadi tidak wajar.

Kedua, korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Dalam kasus itu pencurian uang atau sumber daya dilakukan dengan melakukan *mark-up* harga barang pada dokumen, sementara kualitas atau kuantitas barang dan jasa yang diterima di bawah nilai yang tercantum dalam dokumen. Transaksi ini memengaruhi secara langsung neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Pengaruh terhadap neraca meliputi penyajian nilai aset dan nilai utang ke pihak ketiga yang lebih tinggi. Dengan sendirinya, penyajian akun-akun tersebut juga menjadi tidak wajar.

BAGAIMANA PENGARUH KORUPSI TERHADAP AUDIT?

Adanya dugaan korupsi pada suatu entitas akan mempersulit tugas auditor. Dalam kondisi lingkungan yang korupsinya relatif tinggi, auditor harus merancang prosedur audit untuk mendeteksi adanya korupsi tersebut. Selanjutnya auditor mengukur pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Kalau dari hasil deteksi, auditor menduga tingkat korupsinya parah, auditor seharusnya menolak mengaudit terhadap laporan keuangan entitas dan menyarankan supaya menggantikannya dengan audit tujuan tertentu untuk membongkar korupsi tersebut. Alternatif terakhir ini lebih disarankan untuk dipilih oleh auditor BPK.

TANGGUNG JAWAB AUDITOR

Salah kaprah dalam WTP menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai luasnya tanggung jawab auditor. Apakah dalam audit umum laporan keuangan auditor bertanggungjawab menemukan korupsi? Apakah kasus korupsi hanya akan diaudit dengan audit jenis lain?

Dalam standar audit sudah dinyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah

merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan jaminan yang wajar tentang tidak adanya kesalahan material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh *error* (kesalahan tidak disengaja), *fraud* (kesalahan disengaja) dan *illegal acts* (tindakan melawan hukum). Menemukan korupsi (salah satu jenis *fraud*) merupakan salah satu tanggung jawab auditor. Selanjutnya ditelusuri dampaknya terhadap laporan keuangan. Auditor harus fokus untuk menemukan ketiga jenis kesalahan tersebut, khususnya korupsi.

Sehubungan dengan korupsi, standar umum audit laporan keuangan sudah menyatakan bahwa auditor dalam melaksanakan *due profesional care* harus bersikap skeptisme yang profesional (*professional skepticism*). Dalam sikap skeptisme yang profesional itu, auditor harus curiga adanya korupsi pada transaksi tertentu, seperti pada contoh kasus perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa dan perjalanan dinas di atas. Auditor tidak bisa berpura-pura tidak tahu tentang adanya korupsi pada suatu entitas karena hal tersebut akan menurunkan kredibilitas auditor itu sendiri.

Selanjutnya, untuk mendalami tindak pidananya, temuan korupsi tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi ada pemeriksaan korupsi untuk tujuan pemeriksaan kewajaran laporan keuangan dan ada pemeriksaan korupsi untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Merupakan kekeliruan besar jika mengatakan bahwa korupsi hanya diperiksa dengan jenis pemeriksaan tujuan tertentu.

BERLINDUNG DI BAWAH MATERIALITAS

Dari sudut pandang materialitas, akuntan masih dapat memberikan opini WTP apabila nilai korupsi tersebut tidak material. Pandangan tersebut tidak salah, namun perlu disadari bahwa nilai korupsi pada umumnya selalu material baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

PERAN TREASURY MANAGEMENT DALAM MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN FISKAL

ABSTRAK

Manajemen perbendaharaan negara (treasury management) merupakan salah satu fungsi strategis Kementerian Keuangan yang dijalankan oleh unit-unit yang ada di dalamnya yaitu: pengelola penerimaan negara dan kas, pengelola pembiayaan serta pengelola aset. Keberlangsungan pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian bangsa sangat bergantung pada fungsi treasury management. Fungsi dasar pemerintah tersebut dapat terlaksana apabila pemerintah dapat mengelola perbendaharaannya yang menjamin ketersediaan solvabilitas untuk melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah direncanakan dalam APBN. Dalam pengelolaan perbendaharaan tersebut dijumpai beberapa tantangan yang dapat mengancam keberlanjutan pengelolaan perbendaharaan, diantaranya: adanya cash-mismatch, kelebihan kas, short-fall pendapatan negara yang berdampak pelebaran defisit APBN. Bagian akhir tulisan ini menganalisis solusi atas tantangan pengelolaan perbendaharaan tersebut sehingga dapat dicapai pengelolaan perbendaharaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: manajemen perbendaharaan, kesinambungan fiskal, defisit, dan aset

PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan selaku pengelola Keuangan Negara dihadapkan pada suatu tantangan untuk memajukan perekonomian bangsa melalui kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam APBN. Melalui instrumen-instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang meliputi penerimaan, belanja dan pembiayaan diharapkan menjadi pendorong (stimulus) bagi kemajuan perekonomian. Komposisi yang tepat diantara ketiga instrumen fiskal tersebut diharapkan menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi, penciptaan *demand* dan *supply* terhadap barang dan jasa, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta distribusi kesejahteraan yang semakin baik.

Di era ekonomi terbuka seperti saat ini, pengaruh dinamika perekonomian internasional tidak dapat dihindarkan dampaknya terhadap perekonomian

domestik. Keterhubungan ekonomi domestik dengan ekonomi internasional diantaranya melalui jalur perdagangan komoditi (ekspor dan impor), pasar uang, dan pasar modal, akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian domestik. Kondisi perekonomian negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat dan China juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara lain. Keterhubungan ini menyebabkan kondisi dari suatu negara atau kawasan akan mudah ditransmisi ke dalam perekonomian Indonesia sehingga berdampak terhadap pencapaian target-target perekonomian.

Kondisi perekonomian global yang masih menunjukkan ketidakpastian dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pengelola keuangan negara untuk mengamankan target-target ekonomi makro yang sudah ditetapkan di dalam APBN. Melemahnya

pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra utama perdagangan, turunnya harga komoditi, serta perbedaan arah kebijakan fiskal dan moneter di beberapa negara akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi domestik, nilai tukar rupiah, dan neraca perdagangan.

Sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat memengaruhi jalannya perekonomian bangsa serta keputusan-keputusan investasi yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Strategi dan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dalam APBN menjadi perhatian utama oleh para pelaku ekonomi. Rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, alokasi sumber daya ekonomi, serta distribusi pendapatan dan kekayaan akan mempengaruhi kondisi ekonomi makro secara umum termasuk permintaan dan penawaran terhadap faktor-faktor

SIMPULAN

Korupsi merupakan objek utama dalam pemeriksaan laporan keuangan (pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara) karena memberi dampak langsung dan material (signifikan) terhadap ketidakwajaran laporan keuangan melalui bukti-bukti transaksi yang tidak kompeten. Fokus audit terhadap korupsi dalam audit laporan keuangan merupakan satu dari tiga tanggung jawab auditor sesuai dengan yang tercantum dalam standar audit. Kegagalan auditor dalam membongkar korupsi dalam entitas menunjukkan proses audit belum dilakukan dengan sempurna atau mengambil kesimpulan secara prematur (*jumping to conclusion*) dalam memberikan opini. Apabila audit laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar audit oleh BPK, korupsi di berbagai entitas pemerintah akan banyak terbongkar.

Sehubungan dengan itu auditor dalam mengaudit laporan keuangan entitas pemerintah hendaknya menggunakan skeptisme yang profesional, sehingga keberadaan korupsi dapat terdeteksi. Opini WTP seharusnya hanya diberikan kepada entitas yang terbukti bebas dari korupsi dan yang telah memenuhi kondisi lainnya. Dengan demikian, salah kaprah terhadap WTP tidak terjadi lagi di Republik tercinta ini.

KEPUSTAKAAN:

Arens A.Alvin, Randal J.Elder, Mark S. Beasley, 2012. *Auditing and Assurance Services* 14th edision. Pearson England.

Peraturan BPK-RI No.01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Nilai korupsi dalam hal ini dianggap material, sehingga materialitas tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk tetap memberikan opini WTP. Materialitas adalah batas maksimal kesalahan dalam laporan keuangan untuk menentukan batas toleransi kesalahan dalam laporan keuangan.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi materialitas, yaitu faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Faktor kuantitatif, antara lain persentasi kesalahan terhadap jumlah anggarannya, misalnya nilai korupsi pada pengadaan barang dan jasa terhadap anggarannya sendiri. Secara umum, persentase korupsi ini tinggi (*material*) pada beberapa entitas

Sementara itu faktor kualitatif adalah tingkat sensitivitas kesalahan dilihat dari sudut pembaca laporan keuangan. Misalnya, kesalahan yang disengaja (*fraud*) seperti korupsi jauh lebih material dibandingkan dengan yang tidak disengaja (*error*). Kesalahan yang disengaja menunjukkan integritas pimpinan rendah dan tidak bisa dipercaya, sehingga tingkat reliabilitas laporan keuangannya juga menjadi rendah. Biasanya dalam dunia usaha pimpinan perusahaan yang korupsi tidak akan dipakai lagi pada periode berikutnya alias dipecat.

Undang-undang tentang pemberantasan korupsi sudah menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi menyebabkan dampak negatif yang luar biasa terhadap berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan entitas yang bersangkutan.

Korupsi dengan jelas memenuhi syarat materialitas yang harus memengaruhi opini auditor, sehingga entitas tersebut seharusnya tidak mendapatkan WTP.

produksi. Selain untuk mendorong perekonomian bangsa, pemerintah juga berharap agar rencana dan kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam APBN juga memberikan manfaat bagi pemerintah terutama untuk memantapkan konsolidasi fiskal, guna mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), dan ketahanan hutang yang berkelanjutan (*debt sustainability*), sebagai salah satu upaya dalam menuju kemandirian bangsa.

Keberlangsungan pemerintah untuk menjalankan fungsi utamanya yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian bangsa sangat bergantung pada fungsi perbendaharaan (*treasury*). Fungsi dasar pemerintah tersebut dapat terlaksana apabila pemerintah dapat mengelola perbendaharaannya dengan baik atau dapat disebut sebagai pengelolaan perbendaharaan pemerintah yang berkelanjutan (*sustainable treasury management*) yang menjamin ketersediaan solvabilitas untuk melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah direncanakan dalam APBN. Sehingga, sebagai tema utama yang akan dideskripsikan dalam artikel ini adalah: bagaimana Pemerintah mewujudkan pengelolaan perbendaharaan negara yang mendorong tercapainya kondisi fiskal yang *sustainable*?

PRAKTIK PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN

Untuk mewujudkan arah kebijakan fiskal, pemerintah harus didukung oleh manajemen perbendaharaan negara yang efektif dan efisien. Fungsi manajemen perbendaharaan dalam suatu institusi sangatlah luas dan menjadi jantung dari organisasi tersebut. Bragg (2010; 3) menyebutkan bahwa manajemen perbendaharaan bertanggung jawab terhadap likuiditas, memantau arus kas dan kebutuhan pencairan dana, menginvestasikan kelebihan kas, serta memutuskan untuk melakukan pinjaman dan perolehan modal. Selain itu, pengelola perbendaharaan juga harus menjalin hubungan yang baik dengan para pemberi pinjaman dan investor.

Fungsi manajemen perbendaharaan menjadi sangat penting dalam pengelolaan

keuangan negara secara keseluruhan karena melalui fungsi tersebut menjamin bahwa pemerintah memiliki kas dan aset dalam jumlah yang diperlukan untuk memenuhi peran dan program yang sudah tercatat dalam dokumen anggaran (APBN) secara berkesinambungan (*sustainable*). Fungsi-fungsi ini juga menjamin bahwa pemerintah, memiliki kestabilan dan kesinambungan finansial.

Pada praktik pengelolaan keuangan negara secara internasional, pengelola perbendaharaan negara setidaknya menjalankan 6 fungsi, yaitu: (1) pengelolaan kas, (2) pengelolaan rekening pemerintah, (3) perencanaan penerimaan dan perkiraan pengeluaran, (4) pengelolaan utang negara, (5) pengelolaan hibah luar negeri dan bantuan internasional, (6) pengelolaan aset-aset keuangan (Martinez-Mendez, Parente, dan Ter-Minassian, 1995).

Sedangkan ruang lingkup tugas pengelola Perbendaharaan Negara diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa ruang lingkup tugas Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Adapun fungsi perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber-sumber pembiayaan yang paling murah, dan pemanfaatan dana menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Sesuai dengan misi Kementerian Keuangan untuk menjadi pengelola keuangan negara bertaraf internasional, sejak tahun 2009 Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi berkelanjutan. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah melakukan transformasi kelembagaan yaitu perubahan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi dan penyelarasan struktur organisasi, perbaikan proses bisnis, modernisasi kebijakan dan manajemen SDM, serta perbaikan tata kelola dan kualitas

pelayanan yang diberikan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang unggul di tingkat dunia. Salah satu sasaran dari transformasi kelembagaan tersebut adalah mewujudkan pengelolaan perbendaharaan terpadu sehingga tercipta deviasi dari target saldo dana cadangan melalui CMO (*Cash Management Office*)/DMO (*Debt Management Office*) menjadi unit yang sederhana, efisien dan terintegrasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025, ada 8 fungsi strategis terkait manajemen perbendaharaan. Fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat menjamin pemerintah memiliki kestabilan dan kesinambungan financial. Delapan fungsi perbendaharaan tersebut adalah: (1) Pengelolaan pencairan (*dishbursement management*), yaitu mengeluarkan kas secara efisien untuk mendanai program-program yang tercatat dalam dokumen anggaran sekaligus memastikan bahwa terdapat kendali yang diperlukan, (2) Pengelolaan penerimaan (*receipt management*), yaitu pengumpulan kas dari berbagai sumber penerimaan negara, (3) Pengelolaan kas (*liquidity management*), yaitu pengelolaan saldo kas pemerintah untuk mengoptimalkan *cost of funds* sekaligus meminimalkan risiko terjadinya kekurangan kas, (4) Pengelolaan utang, yaitu penerbitan utang pemerintah (pinjaman, surat berharga negara, sukuk) memiliki biaya rendah dan dalam risiko yang dapat ditoleransi disetujui oleh pemerintah, (5) Pengelolaan risiko, yaitu pengelolaan aset dan kewajiban (*on-balance sheet* dan *off-balance sheet*) untuk menjaga *sovereign net worth*, (6) Pengelolaan Aset, yaitu pengelolaan aset pemerintah (fisik dan finansial) untuk memastikan bahwa aset tersebut terutilisasi secara penuh dan dikelola oleh pemerintah, (7) Akuntansi dan Pelaporan (*accounting and reporting*), yaitu pembuatan sistem akuntansi untuk pemerintah dan pembuatan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangat baik, dan (8) Tugas Khusus (*special mission*), yaitu tugas-tugas pembangunan tambahan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Keuangan yang ada saat ini, fungsi-fungsi perbendaharaan tersebut dilaksanakan pada berbagai unit Eselon I, yaitu: (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menangani 5 fungsi yaitu fungsi pengelolaan pencairan, pengeloan penerimaan, pengelolaan kas, akuntansi pelaporan dan tugas khusus, (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menangani 2 fungsi yaitu fungsi pengelolaan utang dan pengelolaan risiko, serta (3) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menangani fungsi pengelolaan aset.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan koordinasi terutama terhadap peningkatan pengelolaan aset keuangan dan liabilitas melalui koordinasi yang lebih erat antara pengelolaan utang, pengelolaan kas, pengelolaan risiko (likuiditas dan pasar), kewajiban kontinjensi, dan pengelolaan investasi publik maka dibentuklah Komite Pengelolaan Aset dan Likuiditas (*Asset and Liability Management Committee*) pada bulan Februari 2013. Komite ALM adalah komite bertugas untuk membantu Menteri Keuangan antara lain untuk menentukan kebijakan pengendalian risiko likuiditas (*shortage of cash*) dan risiko pendanaan (*shortage of financing*) yang timbul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam kerangka ALM. ALMC bertemu setidaknya sebulan sekali atau lebih, sesuai permintaan Menteri Keuangan.

Saat ini, setiap unit pengelola fungsi perbendaharaan telah menerapkan berbagai strategi untuk mencapai sasaran kinerja terbaik, yaitu terciptanya manajemen perbendaharaan negara yang berkesinambungan. Berikut ini diuraikan ketiga fungsi tersebut dengan berbagai strategi yang diterapkan, yaitu:

1. Manajemen Kas

Fungsi Manajemen Kas meliputi fungsi pengelolaan pencairan dan pengelolaan penerimaan. Seperti diketahui bahwa likuiditas kas merupakan hal yang penting bagi suatu institusi publik, sesuai dengan salah satu prinsip manajemen

keuangan dalam investopedia, *cash is the king*. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait keuangan bagi suatu institusi adalah kas. Dengan memiliki kecukupan kas, maka akan semakin mudah bagi institusi tersebut untuk menentukan keputusan strategis terkait keuangan.

Lienert (2009) mengemukakan empat tahapan dalam mereformasi manajemen kas pemerintah. Tahap pertama adalah sentralisasi saldo kas pemerintah. Tahap ke dua adalah mempersiapkan perencanaan kas dan mengembangkan kemampuan manajemen kas. Tahap ke tiga yaitu melewati prasyarat dan perencanaan kas dasar. Serta mengenalkan manajemen kas harian aktif merupakan tahap yang terakhir.

Teori-teori di atas sangat relevan dengan strategi manajemen kas secara umum yang diterapkan oleh Ditjen Perbendaharaan dengan rincian sebagai berikut :

a. Rekening Tunggal Perbendaharaan (*Treasury Single Account/ TSA*)

Pembentukan rekening tunggal perbendaharaan merupakan salah satu ciri utama dari pengelolaan perbendaharaan secara modern dan merupakan alat yang efektif bagi pengelola perbendaharaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara terpusat atas uang tunai (kas) yang dimiliki oleh pemerintah. TSA dapat didefinisikan sebagai struktur terpadu dari rekening bank pemerintah yang memungkinkan pemerintah melakukan konsolidasi dan pemanfaatan secara optimal atas sumber daya berupa uang tunai yang dimiliki oleh pemerintah (Fainboim dan Pattanayak, 2010).

Tujuan utama TSA adalah memastikan kendali agregat yang efektif atas saldo-saldo kas pemerintah. TSA, yang mengkonsolidasikan saldo-saldo kas pemerintah, adalah fitur utama pengelolaan kas yang efisien. TSA terkait dengan arus kas masuk dan

arus kas keluar yang diperoleh dari pemungutan pendapatan, belanja, utang, dan transaksi keuangan lain. Pengaturan TSA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Rekanan Bank Umum dalam Rangka Penerapan TSA memungkinkan pemerintah untuk secara lebih baik mengelola berbagai risiko terkait dengan penyimpanan kas dan mengambil keputusan tentang keuangan publik secara keseluruhan, khususnya yang terkait dengan defisit dan surplus kas. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa TSA memberikan manfaat antara lain:

- Mempermudah pengelolaan kas pemerintah dengan meminimalkan biaya peminjaman
- TSA memungkinkan Perbendaharaan untuk meminimalkan saldo kas 'menganggur' pada rekening-rekening pemerintah.
- Meminimalkan biaya-biaya transaksi dalam pelaksanaan anggaran dengan mempercepat transaksi penyetoran penerimaan pemerintah (baik pajak maupun bukan pajak) oleh bank-bank yang melakukan pemungutan, dan memastikan efisiensi penjadwalan pembayaran pengeluaran rutin pemerintah; menyediakan mekanisme pengendalian arus keluar kas yang selaras dengan keseluruhan rencana dan komitmen kas; dan memfasilitasi rekonsiliasi antara data perbankan dan data pembukuan.
- Mengamankan dana pemerintah, biasanya TSA dikelola di bank sentral sehingga risiko penyimpanan dana pemerintah berada di bank sentral.

b. Perencanaan Kas (*Cash Forecasting*)

Agar pengelolaan kas dapat dilakukan secara efektif, pengelola perbendaharaan perlu mengembangkan perkiraan arus kas masuk dan keluar dalam jangka pendek yang akurat dan tepat waktu. Perkiraan arus kas tersebut diharapkan dapat memprediksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dan transaksi pembiayaan. Salah satu tujuan utama perkiraan arus kas adalah untuk mengantisipasi kebutuhan uang tunai dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan pada waktu yang tepat (Lienert, 2009)

Pada parakteknya, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai *Chief Operational Officer* (COO) diwajibkan membuat rencana/ jadwal pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan membuat perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana berdasarkan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut yang disampaikan kepada BUN/ Kuasa BUN sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) untuk penyusunan perencanaan kas. Penyusunan perkiraan penarikan dana dan/ atau perkiraan penyetoran dana ini didelegasikan kepada para Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana yang dilakukan oleh Satuan Kerja ini disampaikan kepada KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah, di wilayah kerja masing-masing satker tersebut. Perkiraan penarikan dana dibuat secara periodik yaitu bulanan, mingguan dan harian sedangkan perkiraan penyetoran dana dibuat secara periodik bulanan dan mingguan. Ruang lingkup perencanaan kas meliputi perencanaan penerimaan negara, perencanaan pengeluaran negara, dan perencanaan saldo RKUN yang dilakukan secara periodik dalam rangka pelaksanaan APBN.

c. Manajemen Kas Aktif (*Cash Active Management*)

Manajemen terhadap saldo kas dilakukan untuk meminimalisir kas yang “menganggur” dengan mengelola kelebihan saldo kas yang ada di Bank Indonesia, melakukan *Treasury Notional Pooling* (TNP), serta pengelolaan terhadap rekening pemerintah lainnya.

TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan rekening lainnya yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening. Pelaksanaan TNP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.05/2009 tentang Penerapan *Treasury National Pooling* pada Rekening Bendahara Pengeluaran memungkinkan pemerintah untuk dapat memonitor seluruh rekening bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan rekening lainnya, memantau jumlah uang yang ada pada rekening tersebut secara aktual, dan memperoleh pendapatan bunga yang cukup baik. Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pejabat pengelola rekening lainnya hanya diperkenankan melakukan penarikan uang dari rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional bank umum, tidak diperkenankan melakukan penarikan uang dari rekening bendahara pengeluaran diluar jam operasional bank umum.

Pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas pemerintah pusat diatur dalam PMK nomor 03/PMK.05/2010. Pengelolaan Kelebihan Kas dapat dilakukan kedalam beberapa jenis investasi, yaitu penempatan uang negara pada Bank Sentral. Penempatan Uang Negara pada Bank Umum,

Pembelian Surat Berharga Negara dari pasar Sekunder, *Reserve Repurchase Agreement*. Pada tanggal 30 Januari 2009 dibuat suatu kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengenai remunerasi saldo kas di Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009, Nomor 11/3/KEP.GBI/2009 tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara. Penempatan uang negara di Bank Umum dilakukan dalam bentuk *Overnight*, *Deposit on call*, dan *Time Deposit*.

Saat ini kas negara telah terpusat pada satu entitas yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) sehingga pemanfaatan kas secara strategis sangat dimungkinkan. Seiring dengan perubahan visi manajemen kas dari pasif menjadi aktif, pada tahun 2015 DJPBN telah mengimplementasikan *Treasury Dealing Room* (TDR) dan membawa paradigma manajemen kas aktif ke level yang lebih tinggi.

2. Manajemen Utang

Tujuan utama pengelolaan utang adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran pemerintah dan kewajiban pembayaran kembali utang mampu dipenuhi dengan biaya serendah mungkin dalam jangka menengah atau jangka panjang, sesuai dengan tingkat risiko yang terkendali (IMF dan Bank Dunia, April 2014). Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 447/KMK.06/2005 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-2009. KMK 447 merumuskan tujuan manajemen utang sebagai berikut: “Secara umum tujuan pengelolaan utang negara dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali.

Secara terperinci, tujuan pengelolaan utang adalah:

- Menjamin terpenuhinya *financing gap* dan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*) yang sesuai dengan kondisi ekonomi makro, serta biaya terendah;
- Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang terutama untuk meminimalkan risiko, baik risiko pasar maupun risiko *refinancing*;
- Mengembangkan upaya-upaya agar pinjaman yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan perkiraan biaya.

Berbeda dengan strategi pengelolaan kas yang mempunyai fokus jangka pendek dan terbatas pada tahun anggaran, strategi pengelolaan utang memiliki cakupan jangka menengah hingga jangka panjang. Adapun strategi pengelolaan utang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dalam negeri
Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dalam berutang, strategi mengutamakan pembiayaan dari dalam negeri bertujuan untuk mengurangi terjadinya risiko nilai tukar pada saat utang jatuh tempo yang dapat menyebabkan jumlah utang menjadi lebih besar tanpa adanya pinjaman baru.
- Fleksibilitas Pemenuhan kebutuhan utang
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mempunyai fleksibilitas waktu dalam pengadaan utang. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Fleksibilitas yang pertama yaitu pengadaan utang yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan (T-1) atau disebut *pre-funding*. Strategi ini ditempuh dalam rangka memenuhi *cash miss-match* yang diprediksi akan terjadi pada awal tahun. Strategi yang kedua adalah *front loading strategy* yaitu upaya dari DJPPR untuk dapat menjaga ketersediaan kas pemerintah

melalui pemenuhan target defisit APBN yang diupayakan mayoritas dapat terpenuhi pada semester I tahun anggaran. Strategi ini diterapkan antara lain untuk menghindari terjadinya penambahan biaya berutang. Sebagaimana diketahui bahwa permintaan *yield* yang diminta oleh investor akan mengalami peningkatan menjelang akhir tahun anggaran, seiring dengan berkurangnya dana yang tersedia di pasar modal.

- Pengembangan basis investor dan instrumen pembiayaan

Pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang biaya minimal dan risiko terkendali. Saat ini pemerintah juga telah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan berupa: pinjaman langsung (*direct loan*), penerbitan Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan berbagai tenor yang disesuaikan dengan preferensi investor.

- Pengelolaan Portofolio utang secara aktif

Strategi ini dilaksanakan antara lain melalui *buyback* dan *debt switch* untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar serta implementasi *Asset/ Liability Management* (ALM) dalam upaya untuk menjaga keseimbangan makro. Program *debt switching* dilakukan untuk mengurangi *refinancing risk*, meningkatkan likuiditas pasar SBN, serta mengembangkan pasar SBN.

3. Manajemen Aset

Pengelolaan aset (kekayaan) negara memiliki peran yang strategis bagi kestabilan fiskal. Pengelolaan Aset dapat didefinisikan sebagai cara-cara dalam mengatur, merencanakan, mendesain, dan memonitor dalam

proses mengakuisisi, memelihara, memperbarui, dan pembuangan segala bentuk infrastruktur dan aset teknis; untuk mendukung pengadaan pelayanan publik. Pengelolaan Aset adalah sesuatu yang sistematis, suatu proses yang terstruktur, mencakupi seluruh umur hidup suatu aset fisik (e.g *physical Assets*). Sedangkan tujuan dari pengelolaan aset adalah untuk mengoptimalkan potensi pengadaan pelayanan dari aset yang bersangkutan, meminimalisasi resiko dan biaya, dan meningkatkan nilai positif modal alami dan sosial dalam siklus kehidupan suatu aset. *Good Governance* atau tata kelola yang baik dan penempatan sistim bisnis yang tepat, proses yang sesuai, dan penempatan sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas yang sesuai; adalah faktor-faktor esensial dalam mencapai tujuan diatas (APCC, 2012).

TANTANGAN YANG DIHADAPI

Meskipun pengelolaan perbendaharaan negara telah menerapkan berbagai strategi untuk menjaga agar APBN dapat diimplementasikan dengan baik, namun pada praktiknya dijumpai beberapa tantangan yang dapat menjadi ancaman terhadap keberlanjutan fiskal. Beberapa tantangan tersebut yaitu:

1. Kekurangan Kas Jangka Pendek (*Cash Mismatch*)

Pada waktu tertentu, anggaran tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Demikian halnya dalam hal arus penerimaan negara, sering tidak sesuai dengan perkiraan yang telah ditetapkan oleh pengelola kas. Keterlambatan arus masuk penerimaan negara dapat menyebabkan gangguan terhadap rencana-rencana pendanaan. Kondisi ini disebut sebagai kekurangan kas jangka pendek (*cash mismatch*). Gangguan ini dapat menyebabkan ancaman terhadap ketersediaan kas dan menyebabkan gangguan terhadap realisasi anggaran.

Kondisi ini biasanya terjadi pada awal tahun anggaran, dimana penerimaan

negara tidak sebanding dengan arus pengeluaran negara. Pada awal tahun, biasanya pemerintah telah dibebani dengan pengeluaran yang bersifat imperatif tanpa melihat ketersediaan kas negara. Pengeluaran tersebut diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang, kewajiban kepada pihak lain yang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menggerakkan birokrasi dan menjaga kondisi fiskal agar tidak default. Pengeluaran tersebut saat ini dapat bertambah besar, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Penumpukan Uang Kas (*Excess Liquidity*)

Selain kekurangan kas, kelebihan kas juga menjadi permasalahan dalam *treasury management*. Kelebihan kas ini biasanya disebabkan oleh tiga hal yaitu: Pertama, strategi *'front loading'* tahunan yang diterapkan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk penerbitan SBN berarti bahwa mayoritas penerbitan SBN dilakukan pada paruh pertama tahun berjalan, dengan tujuan mengurangi ketidakpastian dalam perolehan dana dari pasar obligasi dalam negeri yang kurang likuid di negara berkembang seperti Indonesia. Kedua, sebagian besar penerimaan pajak dipungut pada paruh pertama tahun berjalan. Dan ketiga, sebagian besar belanja pemerintah muncul pada triwulan keempat tahun berjalan. Gabungan ketiga faktor ini menyebabkan pemerintah memegang surplus kas yang cukup signifikan.

Siklus belanja oleh pemerintah yang menumpuk pada akhir tahun merupakan peristiwa klasik yang terus berulang setiap tahun. Hal tersebut tentu tidak baik dari sisi perekonomian, di awal tahun dengan jumlah belanja yang relatif kecil akan memberikan dampak yang kecil bagi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan percepatan realisasi belanja pada akhir tahun dapat mendorong terjadinya inflasi. Dalam beberapa penelitian, ditemukan fakta bahwa rata-rata

realisasi pengeluaran pemerintah pada semester pertama hanya sekitar 39% dari total belanja negara.

Jumlah kas yang terlalu besar akan menyebabkan kerugian dari sisi manfaat dan menimbulkan biaya besar dalam memegang kas (*carrying cost of money*). Biaya yang besar ini ditimbulkan oleh biaya perolehan dana terutama yang bersumber dari utang dan tidak segera dimanfaatkan untuk belanja negara sehingga menumpuk di rekening kas negara.

3. Peningkatan Defisit dalam Tahun Berjalan

Perekonomian global yang mengalami penurunan (*slow-down*) setidaknya dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak negatif terhadap pendapatan negara baik yang bersumber dari penerimaan pajak maupun non pajak. Kondisi tersebut membawa perubahan jenis defisit yang diterapkan pemerintah dari defisit struktural yang bermanfaat sebagai stimulus perekonomian, menuju ke defisit siklikal yang mengharuskan pemerintah menyusun kembali strategi agar dapat melanjutkan ketahanan fiskal. Salah satu strategi fiskal yang ditempuh adalah dengan menyesuaikan tingkat defisit APBN setelah memperhatikan realisasi pendapatan dan belanja negara. Dampak penyesuaian defisit APBN adalah adanya penambahan utang baru dan penambahan kewajiban di masa yang akan datang termasuk bunga utang. Pelebaran defisit APBN pada tahun berjalan memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah risiko market. Penerbitan utang baru terutama dengan jalan menerbitkan surat berharga Negara setelah semester pertama tahun bersangkutan berisiko meningkatkan biaya utang. Hal ini disebabkan likuiditas pasar modal pada semester kedua telah berkurang, sehingga investor akan meminta *yield* yang lebih tinggi terhadap permintaan dana.

Idealnya penambahan utang baru harus diiringi dengan pemanfaatan yang optimal pada sisi pengeluaran

negara sehingga menjadi stimulus yang menciptakan penerimaan negara. Belajar dari tahun 2015, terdapat kenyataan bahwa sisi pembiayaan meningkat tetapi tidak diiringi dengan realisasi belanja yang optimal sehingga peningkatan pembiayaan kurang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan negara. Akibatnya pendapatan negara tidak dapat menutup pengeluaran negara, belum termasuk bunga utang yang juga berada pada sisi pengeluaran pemerintah (*above the line*). Untuk membayar bunga utang tersebut pemerintah harus menggunakan pendanaan yang berasal dari utang. Dalam kondisi ini APBN mengalami defisit keseimbangan primer (*deficit primary balance*). Kondisi ini tentu akan menjadi tantangan bagi ketahanan fiskal di masa depan, karena utang tidak digunakan untuk investasi.

4. Rendahnya PNB dari Aset Negara

Minimnya optimalisasi aset-aset *idle* dapat terlihat dari PNB hasil pemanfaatan aset seperti sewa dan aktivitas pengelolaan BMN lainnya yang masih terlalu kecil dibandingkan nilai aset tetap secara keseluruhan.

Rendahnya *yield* yang secara langsung diperoleh dari pengelolaan aset oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemanfaatan BMN belum cukup dilakukan secara optimal. Belum optimalnya PNB dari aktivitas pemanfaatan juga tidak bisa lepas dari ketidaktaatan K/L terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seringkali K/L memanfaatkan barang dengan tarif atau prosedur yang tidak semestinya.

ANALISIS SOLUSI

Berdasarkan hasil pengamatan, kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh diantaranya adalah:

1. Pemanfaatan *bumper* pembiayaan

Kebutuhan kas pada awal tahun untuk pengeluaran pemerintah yang bersifat keharusan (*imperatif*) seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja

pembayaran pokok utang dan bunga serta pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga merupakan belanja prioritas tidak dapat dihindarkan. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga berkonsekuensi terhadap peningkatan penyediaan dana pada awal tahun anggaran. Hal ini akan menjadi permasalahan ketika pemerintah mengalami keterlambatan dalam memperoleh pendapatan, sehingga pemerintah harus mengusahakan sumber-sumber lain yang memungkinkan agar Pemerintah dapat memenuhi kewajibannya. Ada beberapa skenario yang digunakan untuk membiayai *cash mismatch* tersebut, yaitu dengan memanfaatkan *bumper* pembiayaan diantaranya adalah:

a. Memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/KM.05/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/KM.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) disebutkan bahwa SAL adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Sesuai dengan peraturan tersebut, SAL dapat digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN dan memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu dalam hal realisasi penerimaan negara tidak mencukupi membiayai pengeleluaran tersebut.

b. Melakukan *Pre-Funding*

Dalam membiayai *cash miss-match* diprioritaskan menggunakan dana-dana non-utang. Namun dalam kondisi tertentu pemerintah dihadapkan pada kebutuhan dana yang sangat banyak sehingga harus menambah sumber pembiayaan

dari utang. Salah satu strategi yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi *cash miss-match* diawal tahun adalah dengan *pre-funding* yaitu realisasi pembiayaan sebelum pelaksanaan tahun anggaran.

c. Melakukan penarikan pinjaman siaga (*standby loan*)

Instrumen *bumper* lainnya yang dapat digunakan adalah Pinjaman Siaga yaitu pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral dan bilateral, antara lain World Bank (*Program For Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (PERISA)*), Asian Development Bank (*Precautionary Financing Facility* dan/ atau *Countercyclical Support Facility*). Pinjaman siaga merupakan komitmen dari lembaga donor untuk memberikan pinjaman yang dapat digunakan ketika pemerintah memerlukan.

2. Terobosan untuk merealisasikan belanja negara secara optimal

Belanja negara dalam pertumbuhan ekonomi domestik masih memegang peranan yang dominan. Porsi Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari belanja Negara saat ini mencapai 20%. Agar belanja negara memberikan manfaat bagi perekonomian domestik, maka realisasi belanja negara diusahakan terserap secara proporsional. Sebenarnya setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan membuat rencana penyerapan anggaran, namun saat ini *trend* pengeluaran negara masih belum sesuai rencana penyerapan. Pengeluaran negara biasanya akan meningkat pada kuartal IV tahun bersangkutan dan beberapa pos pengeluaran akhirnya tidak terserap dan menjadi SILPA.

Beberapa langkah yang dilakukan agar penyerapan anggaran menjadi lebih baik adalah dengan membuat pola *disbursement* yang lebih baik, sehingga penyerapan anggaran memiliki pola yang proporsional. Selain itu, unit pengelola pelaksanaan anggaran juga memantau beberapa

Kementerian/Lembaga yang mempunyai kontribusi besar dalam penyerapan anggaran. Dengan menggunakan teknologi informasi yang saat ini terus dikembangkan, unit pengelola pelaksanaan anggaran dapat memantau realisasi penyerapan anggaran dan dapat membuat himbauan kepada K/L yang mengalami deviasi penyerapan anggaran.

Pemerintah sebenarnya juga telah melakukan langkah strategis lainnya, diantaranya adalah kebijakan untuk mengadakan lelang pekerjaan lebih awal atau sebelum masuk tahun anggaran bersangkutan (lelang Pra-DIPA). Dengan sistem ini diharapkan kegiatan-kegiatan yang mempunyai alokasi dana yang cukup besar dapat realisasikan sejak awal tahun anggaran dan menciptakan penyerapan anggaran yang lebih proporsional.

Untuk mendorong penyerapan anggaran dan mewujudkan belanja negara yang berkualitas, Pemerintah pada tahun 2015 juga membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Tugas tim ini adalah mencari terobosan yang diperlukan dalam memperbaiki realisasi anggaran, baik di K/L maupun pemerintah daerah termasuk mencari sousi terhadap hambatan (*debottlenecking*) dalam penyerapan anggaran (Widiarto, 2016).

3. Strategi Pengendalian Defisit

Untuk mengurangi laju pelebaran defisit, pemerintah telah mengupayakan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, dengan mengimplementasikan kebijakan diantaranya adalah *Tax Amnesty*. Kebijakan ini selain diharapkan menambah penerimaan negara dari dana tebusan juga membawa masuk dana masyarakat Indonesia (repatriasi) yang berada di luar negeri. Dampak kebijakan ini selain mengurangi laju pelebaran defisit APBN, juga menambah likuiditas domestik yang bermanfaat bagi perekonomian.

Langkah lain yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan

mengoptimalkan sisi pengeluaran negara. Pemerintah melakukan *review* terhadap pos-pos pengeluaran (*spending review*) dan mengambil langkah pemotongan anggaran (*self-blocking*) terhadap pengeluaran-pengeluaran yang dinilai tidak prioritas. Belanja pemerintah diarahkan kepada belanja yang dapat meningkatkan produktivitas seperti pembangunan infrastruktur. Selain itu, mengingat pertumbuhan ekonomi juga masih ditopang oleh konsumsi, maka belanja pemerintah juga diarahkan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki daya beli yang baik. Pemerintah daerah selaku pengelola dana alokasi pemerintah pusat ke daerah saat ini juga didorong untuk memanfaatkan dananya sebaik mungkin, sehingga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Optimalisasi ini di satu sisi dapat menghemat anggaran dan di sisi lain diharapkan tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya kombinasi kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi laju pelebaran defisit, sehingga kewajiban pemerintah dimasa depan tidak bertambah berat.

4. Optimalisasi Aset

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No.6/2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebenarnya pengelola aset mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan aset yang dimiliki oleh negara agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pendapat negara. Oleh karena itu ke depan, yield dari pengelolaan aset-aset idle perlu ditingkatkan. Paling tidak, yield tersebut tidak terlalu tertinggal dari sektor komersil. Misalkan saja yield dapat ditingkatkan menjadi 0,5%, maka dengan besarnya aset tetap netto pemerintah yang saat ini mencapai

lebih dari Rp1.709 triliun, PNBPN yang dapat disumbang bisa mencapai Rp8,545 triliun.

Untuk meningkatkan *yield* dari BMN, maka upaya pemanfaatan BMN melalui jalinan interaksi dengan sektor swasta perlu ditingkatkan. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah memastikan agar K/L aktif dan secara patuh mendayagunakan BMN yang dimilikinya secara optimal melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh DJKN. Kedua, intensifikasi fungsi pengelolaan terhadap aset-aset idle, dimana DJKN rutin melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik aset sehingga mempertajam perannya dalam menetapkan aset-aset idle. Ketiga, komersialisasi aset-aset *idle* yang memiliki manfaat ekonomi, merumuskan target PNBPN dari pengelolaan BMN yang juga dapat menjadi acuan K/L dalam penetapan indikator kinerja pengelolaan BMN, serta secara aktif berupaya mendayagunakan aset, seperti membuat papan iklan atau pengumuman untuk aset-aset yang akan dimanfaatkan. Keempat, penghapusan aset-aset yang tak lagi memiliki nilai guna melalui pemindahtanganan atau pemusnahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

Peran pengelolaan perbendaharaan (*treasury management*) yang dilaksanakan oleh unit-unit di Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan kas, utang dan aset memegang peranan strategis dalam menjaga agar tugas-tugas pemerintah yang tertuang di dalam APBN dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan dalam mengelola perbendaharaan dengan baik akan menunjang terwujudnya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*).

Pengelolaan perbendaharaan yang berkelanjutan dapat terwujud dengan adanya sinergi antar unit *in-charge* untuk mengatasi berbagai tantangan dalam

pengelolaan perbendaharaan. Adapun solusi agar pengelolaan perbendaharaan negara yang *sustainable* adalah: (1) pemanfaatan bumper pembiayaan berupa pemanfaatan SAL, penggunaan pinjaman siaga dan *pre-funding* SBN, (2) terobosan untuk merealisasikan belanja secara optimal sehingga tercipta penyerapan anggaran yang baik, (3) strategi pengendalian defisit agar pembiayaan APBN tidak menimbulkan beban dimasa depan, (4) optimalisasi pengelolaan aset pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Australian Procurement and Construction Council (APCC). (2012). *Pedoman Sitem Terpadu Pengelolaan Aset yang Strategis*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2016 dari <http://www.cieam.com>.

Bragg, Steven M. (2010). *Treasury Management The Practitioner's Guide*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Kementerian Keuangan dan World Bank. (2014). *Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia: Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas Secara Aktif*.

Fainboim, Israel., & Pattanayak, S. (2010). *Treasury Single Account: Concept, Design and Implementation Issues*. IMF Working Paper. International Monetary Fund.

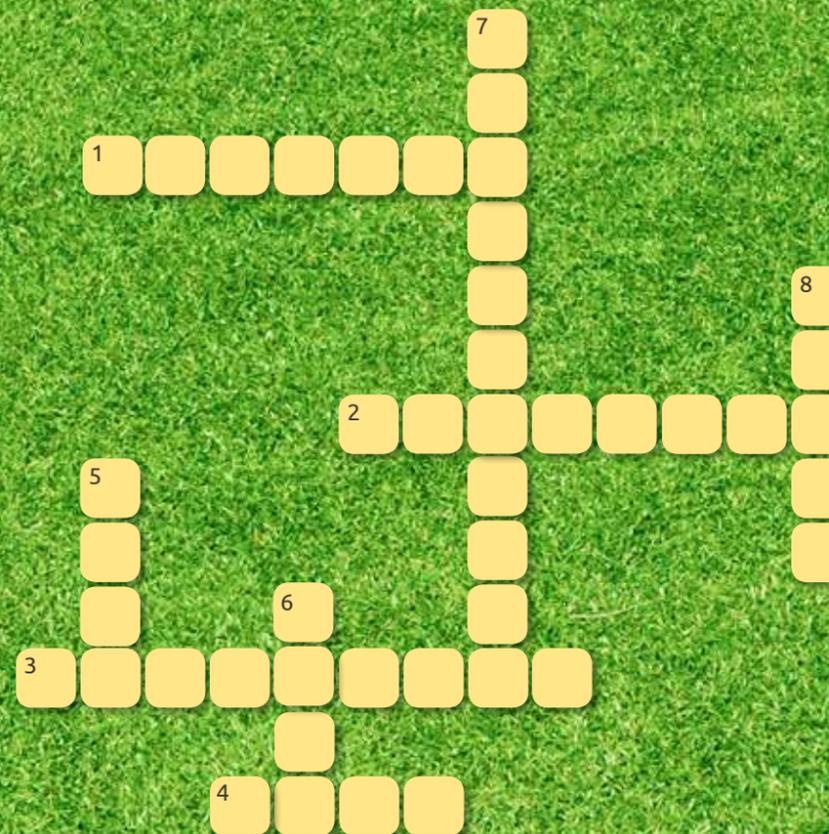
Lienert, I. (2009). *Modernizing Cash Management, Technical Notes and Manuals*. International Monetary Fund.

Mu, Yibin. (2006). *Government Cash Management: Good Practice and Capacity Building Framework. Financial Sector Discussion Series*. World Bank.

Ter-Minassian, P., & Martinez-Mendes. (1995). *Treasury Function and Cash Management*. Wold Bank.



PEMENANG TEKA-TEKI EDUKASI 52: HULTIAH PRASANTI



MENDATAR

1. Widyaiswara yang diangkat dalam profil edisi kali ini
2. Pedoman sikap ASN dalam melaksanakan tugasnya
3. Tari Perang Suku Minahasa
4. Usaha Mikro Kecil Menengah

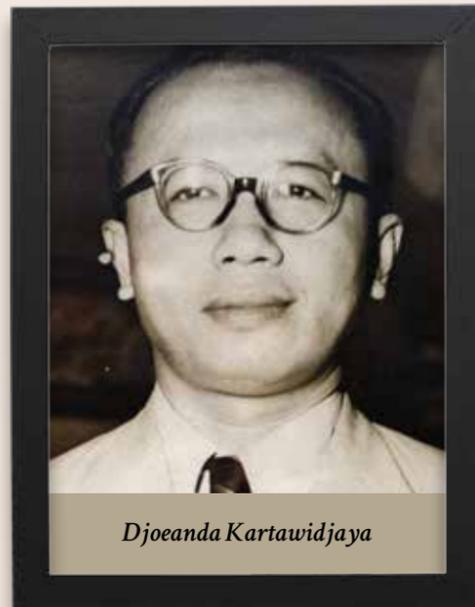
MENURUN

5. Jabatan yang menganalisis penganggaran dalam pengelolaan APBN
6. Pusdiklat penyelenggara e-learning kode etik
7. Menteri Keuangan RI yang menjabat pada tahun 1968-1983
8. Tema artikel Serambi Ilmu yang pertama

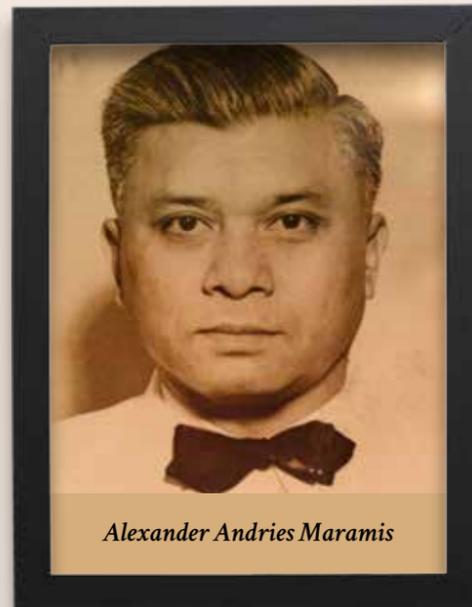
CARA BERPARTISIPASI:

- Follow Akun Instagram BPPK: @BPPKkemenkeu
- Jawaban lengkap dikirim via email ke alamat: edukasikeuangan@kemenkeu.go.id
- Anda hanya boleh mengirimkan jawaban satu kali dan tidak diperkenankan melakukan koreksi
- Cantumkan nama dan alamat lengkap Anda di badan email dengan subjek: Teka-Teki Edukasi 53
- Ikuti ketentuan tambahan yang tercantum di *post* promosi majalah Edukasi Keuangan Edisi 53 di akun Instagram BPPK
- Pengumuman pemenang akan disampaikan di majalah Edukasi Keuangan Edisi 54 dan melalui Instagram BPPK
- Pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari tim redaksi

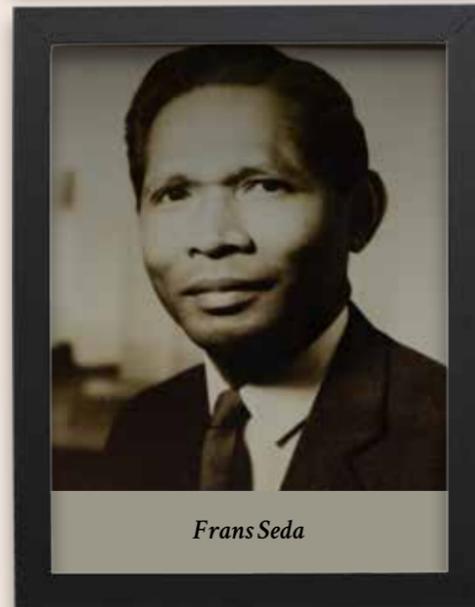
MENTERI KEUANGAN



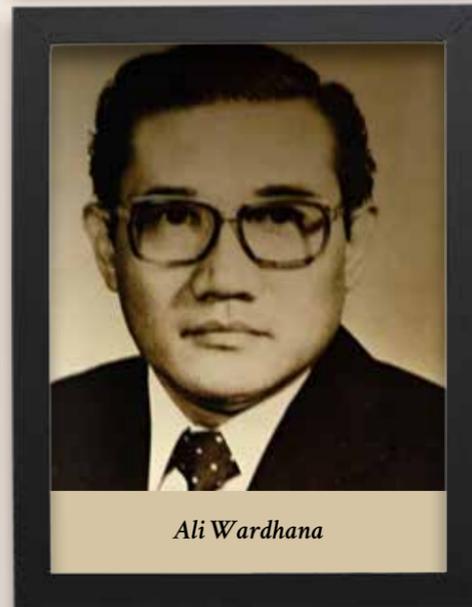
Djoeanda Kartawidjaya



Alexander Andries Maramis



Frans Seda



Ali Wardhana

YANG DIKENANG SEBAGAI
“PAHLAWAN TANPA SENJATA”

Barangkali kita patut bersyukur karena hidup di zaman setelah 74 tahun Indonesia merdeka. Di mana saat Indonesia telah dipercaya menjadi tuan rumah pada beberapa penyelenggaraan bertaraf Internasional dan tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia, seperti Asian Games tahun 1962 dan 2018, Asian Para Games 2018, Annual Meeting International Monetary Fund – World Bank Group (AM IMF-WBG) Oktober 2018, Our Ocean Conference (OOC) yang juga diselenggarakan Oktober 2018. Tak hanya itu saja, Indonesia juga menerima puluhan penghargaan internasional dalam bidang pariwisata. Penghargaan yang diterima tidak bisa dipandang sebelah mata, sebut saja UNWTO (United Nation World Tourism Organization), ITB Berlin (Internationale Tourismus Borse), hingga penghargaan yang dipilih langsung oleh penikmat wisata seperti TripAdvisor Choice Awards dan DestinAsian Magazine Readers' Choice, tentunya masih banyak lagi.

Namun alangkah baiknya jika kita coba tengok ke masa lalu. Di saat negara kita Indonesia, pernah dijajah selama ratusan tahun. Tidak terbayangkan betapa menderitanya rakyat Indonesia saat itu, kekayaan alam yang melimpah dijarah dengan kejam oleh mereka, tidak ada kebebasan layaknya hari ini. Kita menjadi budak di negara sendiri, tak berdaya diancam penjajah. Namun dulu kita tidak bisa tinggal diam, lahirlah para Pahlawan yang berjuang untuk masa depan negaranya. Rasa cinta tanah air menyatu di darah merah mengkar di tulang putih, berjuang mempertaruhkan nyawa demi keluarga dan negaranya.

Pahlawan sejatinya bukan hanya mereka yang mengangkat senjata untuk melawan penjajah atau bertempur di medan perang, tetapi siapa pun yang berani mengorbankan kenyamanan pribadinya demi memperjuangkan kenyamanan orang banyak. Seorang pahlawan sebenarnya juga tidak

membutuhkan kepuasan untuk disebut pahlawan, melainkan untuk melakukan sesuatu tanpa pamrih. Termasuk ketika seseorang itu mampu menyelamatkan perekonomian negaranya ketika kondisi sedang mengalami krisis moneter.

Bersyukur saat ini Indonesia memiliki Sri Mulyani Indrawati yang merupakan sosok Srikandi Indonesia dengan keberhasilannya melepaskan Indonesia dari bahaya krisis ekonomi global, hingga pembenahan besar-besaran di Kementerian Keuangan. Namun kita juga perlu tahu perjuangan sosok Menteri Keuangan Indonesia di era pendahulu juga layak diabadikan sebagai Pahlawan khususnya di bidang perekonomian karena jasa-jasa mereka yang luar biasa besar terhadap kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahukah kamu?

1. DJOEANDA KARTAWIDJAJA

Adakah yang masih ingat dengan Deklarasi Juanda tahun 1957? pasti ada yang pernah belajar salah satu bab dari mata pelajaran Sejarah ini. Sesuai dengan namanya, sang pencetus deklarasi ini adalah Djoeanda Kartawidjaya, sosok yang diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.244/196. Peristiwa ini merupakan jasa terbesar Djoeanda untuk Indonesia.

Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dalam konvensi hukum laut *United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS)*, dikenal sebagai negara kepulauan. (Wikipedia). Kala itu Djoeanda menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, tepatnya Perdana Menteri kesepuluh sekaligus perdana menteri yang terakhir sebelum menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I.

Karena sumbangsih yang pernah diberikan, namanya juga diabadikan sebagai nama Bandar udara di Surabaya,

yaitu Bandara Juanda, karena jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan tersebut sampai terwujud dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Pria kelahiran Tasikmalaya, 14 Januari 1911 ini juga terpampang di lembar uang kertas 50.000 rupiah yang masih kita pakai sampai sekarang. Tak hanya itu saja, namanya pun juga diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta yaitu Jalan Ir. Juanda di bilangan Jakarta Pusat, dan nama salah satu Stasiun Kereta Api di Indonesia, yaitu Stasiun Juanda.

2. ALEXANDER ANDRIES MARAMIS

Ada yang pernah mendengar Oeang Republik Indonesia (ORI)? Alexander Andries Maramis adalah Menteri Keuangan kedua pada Kabinet Presidentil yang menandatangani uang kertas Indonesia pertama tersebut. Ya, nama yang biasa dikenal dengan AA. Maramis ini yang menggantikan Samsi Sastrawidagda Menteri Keuangan Indonesia pertama yang sempat menjabat selama dua minggu dan mengundurkan diri karena sakit.

Di masa awal kemerdekaan Indonesia, pria kelahiran Manado 20 Juni 1897 ini tergabung sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan termasuk dalam panitia Sembilan yang bertugas merumuskan Dasar Negara dengan berusaha menghimpun nilai-nilai utama dari prinsip ideologis Pancasila yang digariskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945.

Peran AA. Maramis bagi perekonomian Indonesia bisa dikatakan sangat krusial. Bagaimana tidak? Pada tanggal 24 Oktober 1945, saat menjabat sebagai Menteri Keuangan A.A Maramis berperan penting dalam pengembangan dan pencetakan uang kertas Indonesia pertama atau Oeang Republik Indonesia (ORI). Beliau menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari data untuk menemukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Hasilnya, percetakan

G. Kolff Jakarta dan *Nederlands Indische Mataaawaren en Emballage Fabrieken* (NIMEF) Malang dianggap memenuhi persyaratan.

Tak hanya sekali, Maramis menjabat Menteri Keuangan hingga dua kali. Di jabatan kali kedua, pada masa Kabinet Hatta I Tahun 1948, beliau melaksanakan perdagangan candu dan emas ke luar negeri atas perintah M. Hatta. Tujuan perdagangan candu dan emas adalah untuk membentuk dana devisa dari luar negeri untuk membiayai pegawai Pemerintah RI (perwakilan-perwakilan) Indonesia di Singapura, Bangkok, Rangoon, New Delhi, Kairo, London, dan New York.

3. FRANS SEDA

Menurut Anda, apa yang terpikirkan ketika mendengar tokoh ini? Jika ada yang sering berdinis ke Gedung Kementerian Keuangan yang berpusat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pasti sudah tidak asing lagi. Frans Seda didedikasikan sebagai nama salah satu Gedung Unit eselon I Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang dahulu sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 bernama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang atau dikenal dengan nama DJPU.

Lantas bagaimana perjalanan karir Frans di Kementerian Keuangan hingga diabadikan menjadi nama Gedung DJPPR? Sebelum dibahas lebih lanjut, mari kita coba mengulik sejarah tentang biografi beliau.

Franciscus Xaverius Seda atau yang lebih dikenal dengan panggilan Frans Seda ini merupakan salah satu putra terbaik bangsa kelahiran 4 Oktober 1926 yang berasal dari

daerah timur, Maumere NTT. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, beliau sempat menjabat sebagai Menteri Perkebunan pada era Presiden Soekarno, Menteri Pertanian, serta Menteri Perhubungan dan Pariwisata pada era Presiden Soeharto. Pada Kabinet Ampera I dan II, tahun 1966 s.d. 1968 Frans menjabat sebagai Menteri Keuangan. Perjalanan yang tidak mudah bagi beliau dalam mengatasi kondisi ekonomi di awal Orde Baru saat itu.

Namun berbekal keberanian dan kejujuran, Seda mampu membawa ekonomi Indonesia ke arah lebih stabil, terbukti berhasil menurunkan laju inflasi dari 650% hingga 112%, dengan menerapkan kesatuan penganggaran Pemerintah serta model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang. Selain itu beliau juga berhasil membawa Indonesia meraih kepercayaan dunia dengan mengembalikan Indonesia menjadi anggota IMF lagi. Tak hanya itu saja, Frans Seda juga sangat peduli dalam memajukan pendidikan. Setelah di akhir hayatnya pada akhir tahun 2009, berkat jasa-jasanya rasanya tak berlebihan jika namanya diabadikan sebagai Gedung DJJPR Kementerian Keuangan dan Bandara Udara di Maumere.

4. ALI WARDHANA

Nama ini sering kita dengar ketika orang membicarakan kampus Politeknik Keuangan Negara STAN. Biasanya mereka menyebut kampus PKN STAN adalah kampus Ali Wardhana. Tak ada yang tak kenal dengan kampus ini, sebuah Perguruan Tinggi Vokasi di bawah naungan Kementerian Keuangan yang selalu berfokus mencetak pengelola keuangan negara bereputasi internasional.

Kenapa nama Ali Wardhana memiliki korelasi yang kuat dengan kampus yang memiliki empat jurusan ini? Lantas siapakah Ali Wardhana ini? Sebelumnya kita bahas dahulu salah satu sosok "Pahlawan tanpa Senjata" yang satu ini.

Pemuda kelahiran Solo, Jawa Tengah, 6 Mei 1928 ini memiliki peran yang sangat besar dalam menyelamatkan perekonomian di Indonesia yang terancam kolaps pada awal masa Orde Baru. Ali Wardhana merupakan salah satu anggota penasihat perekonomian Orde Baru, hingga diangkat menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan I, II, dan III, sejak tahun 1968 hingga tahun 1983. Kurang lebih selama lima belas tahun Ali menjabat dan menjadi Menteri Keuangan terlama di sepanjang sejarah Indonesia.

Selama kepemimpinan Ali di Departemen Keuangan saat itu, banyak sekali terobosan yang ia lakukan, di antaranya adalah menurunkan inflasi dari 650% menjadi 20% dalam tiga tahun masa jabatannya melalui balanced budget, yaitu anggaran pemerintah yang berimbang, sementara Ali juga dinilai telah menyelamatkan ekonomi nasional dari penyakit *the Dutch disease* akibat *boom* migas yang terjadi selama lebih dari 10 tahun, periode 1973-1982. Pemikirannya meninggalkan segudang warisan yang menjadi landasan dari kebijakan fiskal dan moneter di negara ini. Berkat keahliannya, dia juga diakui secara internasional saat diapuk menjadi Ketua Dewan Gubernur Bank Dunia dan IMF pada 1971-1972.

Kembali lagi mengapa nama Ali Wardhana disandang sebagai nama kampus PKN STAN? PKN STAN yang waktu itu masih bernama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) secara struktur ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/1977 tanggal 18 Februari 1977 yang mana pada saat itu Ali Wardhana menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Memang tidak semua Menteri Keuangan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional seperti Djoeanda Kartawidjaya. Namun perjuangan mereka demi menjaga perekonomian negeri ini tetap utuh, sudah selayaknya kita kenang dan kita teruskan.

PUJI F. SUSANTI
FASILITATOR PEMBERDAYAAN UMKM GOOGLE WOMEN WILL

Kiat Memulai dan Mengembangkan Bisnis



FOTO: FREEPIK.COM

Masyarakat saat ini mulai tergugah untuk terjun dalam wirausaha. Orang-orang memulai bisnisnya karena beberapa alasan, biasanya karena mengikuti hobi atau passion atau menambah pemasukan finansial. Beberapa orang bahkan mampu melewati batasan dirinya sendiri, berbisnis kecil-kecilan dan berkembang secara autodidak. Tak sedikit juga yang merelakan jam istirahatnya, bahkan keluar dari rutinitas kerja utamanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis adalah sesuatu kegiatan yang menghasilkan profit atau keuntungan berupa uang. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, Prof Rully Indrawan menegaskan bahwa salah satu penopang ekonomi nasional adalah geliat dan kiprah UMKM. Dalam membuka hari UMKM 2019, Ia menambahkan bahwa ekonomi

Indonesia didukung oleh UMKM. Jumlah UMKM saat ini sekitar 99%, dengan lebih dari 98% berstatus usaha mikro yang berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 60,34%, menyertai pula penyerapan tenaga kerja yang begitu besar.

Menurut riset yang diadakan oleh IFC dan USAID, di Indonesia ada 43% usaha mikro kecil dan menengah yang dimiliki oleh perempuan.



FOTO: SNOWING / FREEPIK.COM

Menjadi pebisnis itu tak mengenal skala besar atau kecil, semua menjalani proses yang sama

Dengan mengasumsikan bahwa para ibu rumah tangga sekarang memulai bisnisnya di rumah, maka ada aliran uang selain dari jatah belanja suami yang menyokong kelangsungan hidup mereka. UMKM ini memiliki peran penting dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia, namun bisnis UMKM ini juga masih memiliki kelemahan saat beroperasi. Pemerintah perlu untuk memberikan dukungan agar bisnis UMKM ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu ada permasalahan keterbatasan inovasi dan teknologi, hingga kesulitan akses ke sumber pembiayaan.

Tantangan selanjutnya kita harus berupaya agar usaha mikro, kecil, dan menengah bisa berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Hal mendasar yang perlu diperhatikan para pemula bisnis mikro kecil menengah antara lain;

KONTINUITAS

Kontinuitas adalah modal dasar yang mengandalkan kognitif dan ketelatenan. Pebisnis yang baik harus siap jatuh bangun untuk memperjuangkan usahanya serta memiliki pemahaman atas produk dan distribusi. Dengan berjalannya waktu, kita akan memahami lebih dalam bisnis serta memperdalam penguasaan pasar.

KOMUNIKASI YANG BAIK

Dalam menjalankan sebuah usaha, kita akan bertemu dan berkomunikasi dengan pelanggan, karyawan, bahkan investor. Komunikasi yang baik dapat membantu kita menyelesaikan masalah secara efektif. Selain itu komunikasi yang baik dapat membangun *brand awareness*.

MANAJERIAL

Manajemen bisnis itu penting karena dengan manajerial yang baik akan;

1. Meningkatkan efektivitas penjualan barang dengan perencanaan matang;
2. Mengelola sumber daya manusia agar bisa beroperasi dengan baik untuk mencapai tujuan bisnis Anda;
3. Bisnis berjalan lebih mulus karena adanya perencanaan dan pengelolaan keuangan, produksi dan distribusi;
4. Adanya kejelasan dalam pemasukan dan pengeluaran untuk pemasaran dan penjualan.

mempengaruhi peningkatan produk dan pelayanan bisnis. Serta tak lupa partner bisnis kita, yang menjaga keberlangsungan produksi kita terus berjalan. Tengkulak langganan bahan dasar produk jualan kita misalnya, adalah bagian dari bisnis kita – meski dia tidak digaji langsung oleh kita, komunikasi yang baik dengannya tentu berakibat pada pasokan bahan dan kesediaan barang produksi. Admin media sosial juga merupakan seorang karyawan. Kurir yang setiap hari datang mengambil produk kita untuk diantarkan kepada pelanggan langsung atau melalui ekspedisi juga merupakan SDM yang perlu kita perhatikan. Manajerial SDM

Pengelolaan konten yang baik secara berkala, disertai promo seperti give away, diskon, cashback, atau semacamnya akan menarik minat konsumen

Menjadi pebisnis itu tak mengenal skala besar atau kecil, semua menjalani proses yang sama. Pemasaran dan jalur distribusi dari produsen ke konsumen yang rumit saat ini bisa diakali dengan berbagai kemudahan teknologi. Pemasaran saat ini dapat dijumpai dengan media sosial dan layanan *store* di *marketplace* daring.

Promosi dan *brand awareness* bisa dibentuk melalui pencitraan di media sosial dengan menyiapkan konten-konten yang menarik pada akun media sosial kita. Konten yang baik adalah konten yang mencerminkan *brand* bisnis kita. Pengelolaan konten yang baik secara berkala, disertai promo seperti *give away*, diskon, *cashback*, atau semacamnya akan menarik minat konsumen. *Copy writing* dan gambar produk yang memadai akan menunjang sebuah konten. Jika tidak punya cukup modal untuk menyewa *copy writer* dan fotografer, kita bisa melakukannya sendiri dan belajar sambil berproses secara autodidak.

Komponen berikutnya adalah sumber daya manusia. Karyawan adalah satu komponen paling penting dalam laju bisnis Anda. Mereka tidak boleh diabaikan sebab kinerja mereka akan sangat

berhubungan dengan pola kepemimpinan kita dan cara berkomunikasi yang tepat. Berikut ini beberapa hal terkait manajemen SDM yang tak boleh kita abaikan;

1. Memahami tim yang membantu menjalankan dan mengembangkan bisnis. Jangan abaikan dinamika tim dan personalitas anggota.
2. Melakukan pendampingan dalam pengembangan kemampuan tim.
3. Pencapaian akademis memang penting, namun kemampuan khusus juga tak kalah penting.
4. Mengenali minat dan ketertarikan SDM, sesuaikan dengan bisnis kita.
5. Sesuaikan *budget* dengan dana untuk membayar gaji SDM.

Jadi, siapkah kita untuk jadi pebisnis?



selalu ada pelangi di setiap badai

GITA LASTIKA
Alumni Tilburg University

Masih teringat jelas, menjalani seleksi tertulis beasiswa FETA 2 adalah sebuah tantangan untuk saya, yang masih dalam masa pemulihan pasca tindakan laparotomi untuk pengangkatan kista endometriosis. Sempat terbersit niat untuk tidak datang seleksi karena masih merasa tidak nyaman untuk banyak bergerak. Saat itu, saya dan suami sedang berikhtiar karena kami sudah menikah sekitar 4 tahun dan belum dikaruniai buah hati.

Setelah menimbang baik buruknya dan berdiskusi dengan suami, saya akhirnya tetap datang seleksi tertulis dan menjalani tes dengan segala keterbatasannya. Sempat merasakan mual dan tidak nyaman di akhir ujian TPA, saya memilih melanjutkan ujian Bahasa Inggris. “Ah sudah tanggung sampai di sini..” pikir saya saat itu. Tidak berharap banyak pada hasil seleksi tersebut, saya justru mendapat kabar baik bahwa saya lolos ke seleksi selanjutnya yaitu tes psikologi dan wawancara. Singkat cerita, saya lolos seleksi, menjalani *pre-departure training* dan siap berangkat kuliah ke Belanda pada Agustus 2017.

Saya dan suami memang berencana untuk “berburu” beasiswa dari kantor masing-masing dan kuliah bersama di luar negeri. Kalaupun tidak bisa di satu kampus, paling tidak masih bisa di satu negara. Tetapi karena proses beasiswa di kantor suami ternyata tidak secepat yang diharapkan, saya sudah bersiap dengan konsekuensi untuk berangkat sendiri lebih awal. Paling tidak masih ada harapan suami dapat menyusul saya di semester berikutnya. Karena segala urusan

persiapan perkuliahan, kami memutuskan untuk berhenti menjalani program kehamilan untuk sementara. Kami pun berencana untuk menjalani program bayi tabung (IVF) setelah menyelesaikan studi.

Beberapa hari sebelum keberangkatan saya ke Belanda, kami mendapatkan sebuah “kejutan”. Setelah hampir 5 tahun pernikahan kami, akhirnya saya hamil. Perasaan kami saat itu bercampur aduk, sangat bahagia tentu saja, tapi bagaimana dengan beasiswa saya? saya harus berangkat kuliah 6 hari lagi, tiket pesawat sudah dipesan, uang deposit dan sewa kamar untuk sebulan ke depan sudah dibayar, bahkan *tuition fee* ke kampus pun sudah dibayarkan oleh Pusdiklat PSDM. Saya kemudian berdiskusi dengan keluarga, dokter kandungan dan pihak universitas. Saat itu opsi terbaik adalah menunda kuliah ke tahun depan. Atas masukan dari universitas dan dokter kandungan, saya memberanikan diri untuk menghubungi pihak Pusdiklat PSDM, dan Alhamdulillah usulan untuk menunda disetujui. Memang ada konsekuensi finansial saat itu, dimana saya akan kehilangan uang sewa kamar dan deposit yang sudah saya bayarkan, sebagian harga tiket pesawat

yang tidak bisa di-*refund*, tetapi hal itu tidak sebanding dengan “kejutan” yang kami terima. Tidak hanya itu, dengan penundaan ini, kemungkinan saya dan suami untuk dapat kuliah bersama menjadi sangat besar.

Kehamilan dan persalinan saya berjalan dengan lancar. Di saat yang bersamaan, kami juga harus mulai kembali berurusan dengan persiapan perkuliahan. Saya sangat berterima kasih kepada sang suami yang pada akhirnya memilih universitas yang sama dengan saya sehingga kami bisa mengurus si kecil bersama-sama sambil tetap berkuliah. Kami memilih program yang berbeda, suami saya memilih *M.Sc in Finance Program* sementara saya memilih *M.Sc in Accountancy Program* sesuai dengan minat masing-masing.

Kemudian, kami berangkat kuliah ke Belanda, tepatnya ke Tilburg University pada Agustus 2018. Saya, suami, dan anak saya Ghazi yang saat itu berusia 4 bulan, dan Ibu saya berangkat bersama. Ya, Kami mengajak Ibu untuk membantu kami mengurus Ghazi karena saat itu kami tidak cukup percaya diri untuk dapat menjalani peran sebagai mahasiswa sekaligus orang tua tanpa bantuan Ibu.

Kegiatan perkuliahan pun dimulai, saya adalah orang Indonesia satu-satunya di program ini. *M.Sc in Accountancy Program* adalah salah satu program yang cukup diminati, ada sekitar 150 orang dalam program tersebut. Menjadi satu-satunya orang Indonesia mengharuskan saya untuk secara cepat membaur dan beradaptasi dengan teman-teman di sana, karena *group assignment* sudah menanti. Saya berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi di Tilburg, dengan segala hal baru yang belum pernah saya temui di Indonesia. Perkuliahan dilakukan di kelas besar, materi harus sudah dibaca sebelum kelas dimulai supaya dapat memahami apa yang diajarkan oleh dosen, *group assignment* yang cukup rumit, dan sistem penilaian yang berbeda dengan universitas di Indonesia. Pelan-pelan saya mempelajari apa yang perlu dilakukan agar bisa mendapatkan nilai yang baik. Selain itu, saya juga tetap harus menjalani peran sebagai ibu, disela-sela perkuliahan saya juga memompa ASI untuk anak saya selama saya tidak di rumah. Perlu diketahui kegiatan memompa ASI adalah suatu hal yang tidak lazim di sana.

Namun walaupun demikian, semua terasa lebih ringan karena kehadiran

Ibu dan suami saya. Sampai pada saat dimana VISA Ibu saya sudah habis masa berlakunya dan harus kembali ke Indonesia. Saat itu kami berpikir bahwa sesampainya di Indonesia, Ibu saya dapat kembali mengurus VISA nya dan terbang lagi ke Belanda untuk mendampingi kami. Setelah mengurus kembali VISA nya, kami mendapatkan kabar bahwa VISA Ibu ditolak karena beliau harus berada di Indonesia selama 3 bulan terlebih dahulu sebelum dapat kembali ke Eropa. Saya menangis, saya merasa tidak mampu untuk menjalani ini semua tanpa dukungan ibu saya.

Kami tidak bisa terpuruk lama-lama, suami kemudian memutuskan untuk mendaftarkan anak kami ke *Day care*, paling tidak sampai ibu saya bisa kembali ke Belanda. Ghazi pun kami titipkan di

mengabarkan kondisi Ayah memburuk, Kami memutuskan untuk membeli tiket pesawat hari itu juga ke Indonesia. Hanya beberapa menit setelah kami memutuskan pulang Ibu mengabarkan bahwa Ayah sudah berpulang. Saya semakin hancur. Kami pulang, bukan untuk menemui Ayah tetapi menemui jasad beliau. Walaupun demikian, Saya bersyukur masih bisa menghadiri pemakaman Almarhum.

Saat itu Saya melupakan sejenak *deadline* thesis yang ada di depan mata. Saya menginformasikan kondisi Saya ke *Supervisor* dan beliau sangat memahami kondisi saya. Saya berkomitmen untuk tetap melanjutkan thesis walaupun saya sedang berada di Indonesia. Hari kedua setelah kepergian Ayah, saya harus kembali berlutut dengan thesis. Mencuri

“Saya berharap semua ini bisa membuat saya menjadi manusia yang lebih baik, Menjadi anak, ibu sekaligus istri yang lebih baik, dan semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat. Aamiin.”

Day care, 2-3 hari seminggu. Kami harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan mengerjakan tugas di hari-hari Ghazi di *Day care*, karena saat bersama Ghazi sangat sulit bagi kami untuk belajar. Sebagai orang tua baru, Kami belum terlatih sehingga urusan menjaga, memandikan, memberi makan, mengajak main Ghazi selalu kami lakukan bersama.

Pada bulan Desember 2018, kami mendapat kabar bahwa Ayah saya terkena serangan *stroke*. Ibu harus menjaga Ayah sehingga kami tidak lagi berharap Ibu saya datang kembali ke Belanda. Kami sudah harus membiasakan diri hidup bertiga di negara orang, menjalani peran sebagai mahasiswa dan orang tua. Ternyata semua dapat kami jalani dengan baik. Kami saling membantu, kami berbagi tugas.

Sampai pada suatu saat, kami menerima kabar buruk bahwa Ayah terjatuh di kamar mandi dan tidak sadarkan diri. Saya merasa hancur. Saya berusaha tenang tapi tidak bisa. Kemudian Ibu

waktu untuk dapat menulis semampu yang saya bisa. Saya berhasil mengirimkan *draft* thesis final tepat waktu ke *Supervisor*. Saya sangat bersyukur ternyata tidak ada lagi revisi yang harus saya dilakukan. Thesis saya akhirnya *defendable*.

Kami kemudian kembali ke Belanda, masih terasa berat untuk saya kembali meninggalkan Indonesia. Tetapi saya harus kembali menyelesaikan yang sudah dimulai. Saya akhirnya lulus sidang dengan nilai yang sangat memuaskan dan mendapatkan predikat *cum laude*, disusul kelulusan suami 2 minggu setelahnya.

Terlalu banyak yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir. Saya berharap semua ini bisa membuat saya menjadi manusia yang lebih baik, Menjadi anak, ibu sekaligus istri yang lebih baik, dan semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat. Aamiin.



AGUNG DARONO

WEB SCRAPING DENGAN “GET & TRANSFORM”

Dalam beberapa situasi, kita membutuhkan informasi yang berasal dari berbagai halaman web (web pages) untuk menyelesaikan pekerjaan. Halaman web tersebut dapat bersumber dari jaringan intranet ataupun internet. Informasi yang dibutuhkan ada kalanya berasal dari banyak halaman web, dan terkadang juga perlu diambil secara berulang atau bahkan secara terus-menerus.

Teknik untuk mengambil data dari halaman web tersebut yang paling sering dilakukan adalah mem-*block* data yang diinginkan, dan menyalin-tempel (*copy-and-paste* atau “*copas*”) data tersebut ke dalam aplikasi pengolah data yang kita gunakan, misalnya Microsoft Excel (selanjutnya: Excel). Teknik ini sangatlah tidak efisien dan cenderung rawan kesalahan jika dilakukan secara berulang dan bahkan juga membosankan apabila dilakukan sebagai aktivitas yang rutin. Tantangan selanjutnya dari teknik ini adalah bagaimana mengkonsolidasikan data tersebut menjadi bagian dari keseluruhan basis data yang kita kelola. Untuk mengatasi hal ini, terdapat satu teknik alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan aktivitas *copas* data yang berulang tersebut, yaitu melalui penggunaan fitur “Get & Transform”

(selanjutnya: G&T) yang ada pada Excel 2016 dan versi setelah itu. Untuk Excel 2013, G&T dikenal sebagai Power Query dan harus diaktifkan sebagai *add-ins*.

Tulisan ini selanjutnya akan terdiri dari tiga bagian. Pertama, penjelasan ringkas tentang *web scraping*. Kedua, penggunaan fitur G&T untuk *scraping* data dari halaman web yang berupa “Table”. Ketiga, aplikasi G&T untuk data dari halaman web bertipe “Document”. Bagian kedua dan ketiga artikel akan dibahas pada laman bppk.kemenkeu.go.id bagian artikel “Teknologi Informasi” (tautan terdapat di akhir tulisan ini).

WEB SCRAPING

Web scraping adalah penggunaan perangkat teknologi untuk mengotomasikan pengambilan

(*extraction*) dan mengorganisasikan data dari web (*world wide web*) yang dapat digunakan untuk analisis data lebih lanjut. Perlu diingat, pengambilan data/informasi dari suatu halaman web harus mempertimbangkan “syarat dan ketentuan”, *legal notice* ataupun hal yang sejenis itu, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengelola situs web yang bersangkutan. Konsekuensi dari situasi tersebut adalah bahwa *web scraping* harus dilakukan dengan terlebih dulu mempertimbangkan ketentuan dari sang pemilik/pengelola halaman web yang sedang diakses (Krotov dan Silva 2018). Perangkat yang populer digunakan antara lain R ataupun Python (Marble 2016). Tulisan ini memilih menggunakan fitur G&T dalam Excel lebih karena popularitas perangkat ini di kalangan pengguna komputer.

G&T UNTUK DATA "TABLE"

Halaman web mempunyai formatnya masing-masing dalam menampilkan datanya. Salah satu format tersebut disebut sebagai Table. Jika format ini yang dipilih maka G&T akan langsung dapat mengenalinya dan kemudian mentransformasi halaman tersebut menjadi sebuah format baris dan kolom yang nantinya dapat disimpan sebagai worksheet di dalam Excel untuk diolah lebih lanjut. Perhatikan langkah-langkah transformasi yang bersumber dari halaman web berformat Table. Data sumber berasal dari link tentang kurs pajak di URL ini: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-kurs-db.asp>. Gambar 1 merupakan ilustrasi langkah 1 s.d. 6:

1. Pilih tab Data, New Query
2. Pilih New Query
3. Pilih From Other Sources
4. Pilih From Web
5. Pilih Basic
6. Masukkan URL: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-kurs-db.asp>

Langkah selanjutnya, 7 s.d. 9, dapat dilihat dalam Gambar 2.

7. Pilih Table 0
8. Untuk menampilkan *preview* dari halaman web sumber, pilih Web View (opsional)
9. Pilih Transform

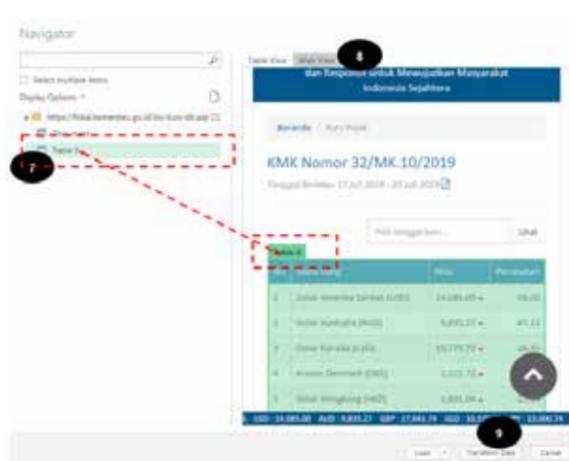
Langkah selanjutnya, 10 s.d. 14, dapat dilihat dalam Gambar 3.

10. Perhatikan Gambar 3 yang diberikan kotak garis putus-putus warna merah. Area ini adalah data yang berhasil dikenali dan ditransform oleh G&T dari halaman web yang di dalamnya terdapat komponen Table data yang langsung bisa diolah menjadi data berformat kolom-baris. Selanjutnya data ini bisa disimpan menjadi sheet dalam Excel. Pilihlah File
11. Pilih Close & Load To
12. Pilih Table
13. Pilih Existing Worksheet
14. Pilih Load

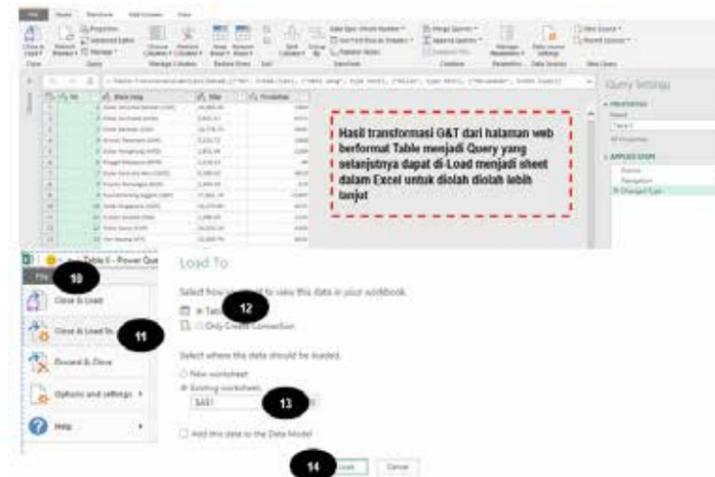
Artikel selengkapnya dapat Anda baca di <http://gg.gg/artikelwebscraping>



Gambar 1 Langkah transformasi data halaman web dengan format Table: 1 s.d. 6



Gambar 2 Langkah transformasi data halaman web dengan format Table: 7 s.d. 9



Gambar 3 Langkah transformasi data halaman web dengan format Table: 10 s.d. 14

LUQMAN HAKIM

KETIKA RUMPUT TETANGGA

ILUSTRASI: FREEF.K.COM

SELALU TERLIHAT LEBIH HIJAU

Sebagaimana kita menikmati kehidupan, seperti itulah kita menjalaninya. Sejatinya, hidup hanyalah tentang sebuah perspektif dari sisi sebelah mana kita memandangnya. Adakalanya perspektif itu membuat kita tidak sadar telah terjebak dan bermain-main dengan perasaan yang kita perankan sendiri. Bisa saja kenyataannya sangat jauh dengan apa yang ada di dalam benak kita. Seperti ungkapan "rumput tetangga lebih hijau" daripada rumput di halaman sendiri. Ungkapan ini menilai kondisi orang lain seakan-akan selalu lebih baik dan beruntung dari kondisi yang kita alami sendiri.

Di sebuah sudut kedai kopi yang hampir tutup malam itu, teman saya bercerita tentang pengalaman pertamanya saat mendaki sebuah gunung tertinggi di Pulau Sulawesi.

Sebelum mendaki, gunung tersebut memang terlihat anggun dari kejauhan, menebar pesona yang mampu merayu para pendaki untuk menjamah puncaknya. Namun, rasa kagum itu berubah menjadi letih yang luar biasa saat menghadapi medan pendakian yang penuh dengan batu-batu dan terbing yang terjal. Pada akhirnya, ia tidak mampu mencapai puncak gunung tersebut disebabkan keterbatasan staminanya.

Gunung yang terlihat anggun dari kejauhan itu sama seperti rumput tetangga yang terlihat lebih hijau. Betapa banyak prasangka versi pribadi yang berlalu-lalang dalam kehidupan kita. Selama ini kita lebih sulit mengenal diri sendiri bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Banyak waktu kita terbuang sia-sia hanya untuk men-judge, mengamati, dan menilai kehidupan pribadi orang lain yang berakibat timbulnya prasangka bahwa rumput tetangga lebih hijau sehingga dapat menjauhkan rasa syukur dari dalam diri kita.

Segala prasangka ini dapat membuat kehidupan kita mulai terlihat tidak enak. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Membandingkan apa yang mereka punyasetemara kita tidak.

Membandingkan perjuangan mereka terlihat begitu mudah sedangkan perjuangan kita sering membuat diri merasa payah. Lama-kelamaan, timbul rasa iri akan jalan mereka yang lurus sedangkan jalan kita berputar-putar penuh liku. Tidak ada habisnya jika kita terus membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain karena membandingkan adalah aktivitas tanpa batas, tanpa akhir.

Sebagai manusia, saya menganggap rasa iri yang muncul itu adalah wajar. Hanya saja, rasa iri tersebut perlu kita kelola menjadi energi yang positif, menjadi motivasi yang dapat melecut diri sendiri. Orang yang terlahir di dunia ini semua memiliki masalah. Adapun yang terlihat secara kasat mata dari pergaulan teman-teman kita kebanyakan hanyalah berupa visualisasi semata. Itu bukan yang sesungguhnya karena setiap orang memilih topeng yang berbeda dalam menghadapi suatu lingkup pergaulan. Ada yang memakai topeng tertawa, tersanjung, terbahagia, terluka, tersiksa, dan terserahlah apa saja.

Setiap hari kita memakai topeng yang berbeda, entah disadari atau tidak. Kita pun sejatinya pernah memakai topeng paling bahagia. Tetapi anehnya, saat kita melihat orang lain terlalu sering memakai topeng paing bahagianya, timbullah pertanyaan dan jawaban secara simultan di benak kita, Apakah dia sungguh-sungguh bahagia? Ah, sepertinya dia memang benar-benar bahagia, tidak

seperti aku, itulah rasa iri yang timbul. Akan tetapi, itu sungguh wajar karena kita hanya manusia. Jika kita tidak pernah merasa iri, mungkin kita sudah sangat layak diangkat menjadi malaikat.

URIP KUWI MUNG SAWANG SINAWANG

Ada pepatah Jawa terkenal yang berbunyi *urip kuwi mung sawang sinawang* yang berarti hidup itu hanya tentang melihat dan dilihat. Kita melihat kehidupan orang lain, tetapi kita juga sadar kehidupan kita dilihat oleh orang lain. Persoalan melihat orang lain dan dilihat orang lain ini membuat kita sering membandingkan dan membayangkan kedua hal tersebut di benak kita. Terkadang kita menjumpai bahwa bayangan dari kenyataan tersebut menjadi sebuah keinginan yang diterima pikiran kita, sementara kenyataan yang didapat sama sekali berbeda atau bahkan tidak pernah kita tahu.

Sebagai contoh, salah seorang teman saya, sebut saja namanya Sari, merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja kantoran di salah satu perusahaan swasta. Sari mempunyai seorang anak balita. Sebagai pekerja kantoran, Sari lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dari pagi sampai dengan sore hari. Hal itu merupakan rutinitas pekerjaannya setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Peran Sari sebagai wanita karier tentu mengharuskan ia meninggalkan anaknya selama jam kerja di bawah asuhan orang lain. Kondisi ini tentu sering membuat Sari patah hati.

Betapa tidak? Sehari-hari anaknya lebih banyak berinteraksi dengan pengasuh, bukan tidak mungkin dapat menimbulkan rasa ketergantungan anaknya kepada pengasuh tersebut. Bisa saja hal ini membuat anaknya lebih mudah menangi jika ditinggal pergi pengasuhnya daripada saat ditinggal dirinya sendiri.

Sebagai seorang *working moms*, Sari terkadang merasa iri terhadap teman-temannya sesama ibu rumah tangga 'murni' yang dapat menemani buah hatinya di rumah sepanjang hari. Apabila keadaan emosinya sedang tidak stabil, sering muncul keinginan Sari untuk *resign* agar dapat mengasuh anaknya sendiri. Namun, saat emosinya kembali sempurna, Sari kembali berpikir ulang, apakah ia siap meninggalkan kariernya selama ini yang telah dibangun sejak sebelum menikah.

Di sisi lain, Sari mungkin tidak mengetahui keluh kesah teman-temannya sebagai *full-time housewife* tersebut yang merasa jenuh harus 24 jam mengurus anak, suami, dan rumah. Barangkali, mereka juga merasa iri terhadap Sari dan ibu rumah tangga yang merangkap sebagai pekerja kantoran lainnya. Mereka menganggap bahwa pekerja kantoran itu keren, mandiri, terlihat eksis, punya penghasilan sendiri, dan punya waktu bergaul dengan teman-teman lain di kantor.

Sari dan teman-temannya memiliki persepsi yang berbeda dalam melihat kehidupan mereka. Di satu sisi, Sari ingin menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya seperti teman-temannya sedangkan di sisi lain, teman-temannya ingin menjadi *working mom* seperti Sari. Apabila dilihat lebih dalam

lagi, menjadi *working mom* merupakan sebuah *priceless* yang membanggakan karena tidak setiap ibu rumah tangga dapat memiliki penghasilan sendiri. Selain itu, bekerja di kantor bisa menjadi '*me time*' khusus bagi *working mom* yang dapat menghilangkan stres sehingga membuat *happy mom* dan *happy mom* tentu juga akan mewujudkan *happy family* sedangkan bagi *full-time housewife*, dapat menghabiskan waktu untuk keluarga di rumah juga merupakan sebuah berkah tersendiri. Sungguh beruntung menyaksikan secara langsung perkembangan anak, mengasuhnya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Banyak para *working mom* yang iri karena tidak bisa meluangkan sebagian besar waktunya untuk anak-anak mereka.

JANGAN HANYA MELIHAT DARI APA YANG TERLIHAT

Sebenarnya, pepatah Jawa yang telah disebutkan tadi masih memiliki kelanjutannya. Lengkapnya, pepatah Jawa tersebut berbunyi: *urip kuwi mung sawang sinawang, mula aja mung nyawang sing kesawang. Artinya, hidup itu hanya tentang melihat dan dilihat, jadi jangan hanya melihat dari apa yang terlihat. Ya, ini poin pentingnya! Jangan hanya melihat dari apa yang terlihat. Seperti dari kedua contoh di atas. Masing-masing tidak pernah mengetahui 'pengorbanan' yang sebenarnya di balik itu semua. Jadi, jangan mudah menyimpulkan segala sesuatu dari apa yang terlihat.*

Sebagai manusia, kita boleh saja menilai orang lain, tetapi jangan sampai terlena oleh penilaian kita tersebut. Jangan sampai kita lebih fokus pada kehidupan orang lain sehingga lupa pada kehidupan diri

sendiri. Terinspirasi dari kesuksesan orang lain memang perlu, tetapi satu hal yang harus kita pahami: proses mungkin bisa sama, tetapi tidak ada hasil yang sama persis. Pada kasus ini, keluasan berpikir juga mempengaruhi seseorang untuk bisa mengucap rasa syukur atas segala sesuatu yang telah kita peroleh. Apabila kita mampu mensyukurinya maka Allah akan menambah nikmat kita. Hal ini sudah dijanjikan oleh Allah dalam Alquran Surat Ibrahim ayat 7:

"dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka pasti azab-Ku sangat berat."

Oleh karena itu, kita tidak perlu iri terhadap hijaunya rumput tetangga. Kita tidak tahu apakah itu rumput sesungguhnya atau hanya rumput sintetis. Namun, kita juga tidak boleh bersikap skeptis akan keaslian rumput tetangga, kita harus tetap menghargainya. Kita berhak berbahagia dan terlihat bahagia. Kita berhak mempunyai rumput yang hijau. Semuanya hanya butuh waktu. Tenang saja, akan tiba saatnya rumput kita terlihat lebih hijau, walau hanya kata tetangga.

IMAM ASMA NUR ALAM M.

SAYANGI TELINGA ANDA

Di kantor, di rumah, di sekolah, di perpustakaan, saat belajar, saat berolahraga, bahkan saat berkendara, ada satu benda selain ponsel yang di zaman melek teknologi ini tak pernah terlewatkan untuk dibawa, bahkan digunakan terutama oleh kawula muda. Benda itu adalah *headphone* atau *earphone* (untuk selanjutnya kita akan menggunakan istilah *headphone* untuk menyebut kelompok alat perantara suara ini-red). Produsen *headphone* pun berlomba-lomba mengeluarkan produk teranyar mereka yang menjanjikan pengalaman audio yang memuaskan. Penggunaan *headphone* bukan tanpa risiko. Syaraf-syaraf telinga yang terpapar gelombang elektromagnetik secara langsung apalagi dalam waktu yang lama tentu mengundang risiko kesehatan.

Menurut data yang dirilis Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2015, lebih dari 1 miliar remaja dan orang dewasa di dunia berisiko kehilangan pendengaran alias tuli, akibat penggunaan perangkat audio di luar batas aman.

Bayangkan seorang karyawan di usia awal 20 tahunan, penggunaan *headphone* sudah dimulai saat ia lari di pagi hari. Saat berangkat ke kantor menggunakan *commuter line*, ia akan menggunakan *headphone* lagi sepanjang perjalanan. Sepanjang jam kerja di kantor, mungkin ia akan menggunakan *headphone* lagi untuk mendengarkan lagu. Dilanjutkan dengan penggunaan *headphone* saat perjalanan pulang, duduk di kafe, hingga menjelang tidur. Tak sadar, sudah lebih dari 5 jam dalam sehari, ia habiskan dengan *headphone* di kepalanya. Padahal, sebagian peneliti menyebutkan bahwa penggunaan *headphone* termasuk berbahaya jika sudah lebih dari 5 jam dalam seminggu. Lalu sebenarnya, risiko apa saja yang bisa ditimbulkan dari penggunaan *headphone* secara berlebihan?

TELINGA BERDENGUNG

Biasa disebut *tinnitus*, hal ini terjadi ketika ada sensasi mendengung di telinga kita akibat terpapar suara yang terlampau lantang. Dengungan ini terjadi akibat adanya kerusakan pada sel rambut di dalam koklea (rumah siput) telinga yang menyebabkan otak salah menerima dan mengirimkan sinyal.

EAR FATIGUE

Seseorang yang sering mendengarkan musik memakai *headphone* dapat mengakibatkan kelelahan telinga atau *ear fatigue*. Hal ini bisa terjadi apabila telinga mendapat stimulus suara dalam waktu yang lama. Kelelahan telinga ini nantinya akan membuat telinga terasa sakit dan menimbulkan rasa perih. Bahkan, kelelahan telinga yang tidak diatasi bisa menjadi penyebab telinga berdarah.

INFEKSI TELINGA AKUT

Penggunaan *headphone* terlalu sering bisa merangsang pertumbuhan bakteri

karena suhu dan kelembaban meningkat pada saluran pendengaran. Hal ini akan membuat telinga lebih rentan terhadap infeksi karena bakteri patogen terlalu banyak di dalam telinga. Selain itu, *headphone* yang seringkali diletakkan pada tempat terbuka dan jarang dibersihkan menjadi tempat subur pertumbuhan kuman. Kuman serta bakteri tersebut berpindah ke dalam telinga dan tumbuh subur di dalamnya. Belum lagi saat ini orang dengan mudahnya saling meminjamkan *headphone* tanpa peduli risikonya. Akumulasi bakteri ini bisa mengakibatkan radang telinga yang bisa berakhir dengan rusaknya telinga secara permanen karena peradangan menjadi semakin kronis.

GANGGUAN OTAK

Walaupun belum terdapat bukti medis yang kuat untuk hal tersebut, tapi kebanyakan pengguna *headphone* ditemukan cenderung memiliki masalah pada otak. Hal ini karena bagian dalam telinga langsung terhubung dengan otak. Sedikit saja infeksi terjadi pada bagian dalam telinga, dapat langsung memengaruhi otak.

TIDAK PEKA TERHADAP LINGKUNGAN

Menggunakan *headphone* juga bisa berakibat fatal saat Anda seharusnya awas dengan lingkungan sekitar. Saat mengendarai motor misalnya, sebaiknya Anda tidak mendengarkan musik melalui *headphone* karena Anda akan menjadi tidak peka terhadap suara klakson kendaraan lain yang bisa menyebabkan kecelakaan.

Penggunaan *headphone* di kantor juga sebaiknya dikurangi karena membuat Anda seolah antisosial dan *disconnected* dari sekeliling Anda. Anda jadi tidak bisa mendengar apa yang terjadi di sekeliling Anda dan tidak bisa mendengar saat rekan atau atasan Anda memanggil Anda.

TIPS PENGGUNAAN HANDPHONE

Lalu apa saja yang bisa Anda lakukan agar efek buruk penggunaan *headphone* bisa Anda hindari meskipun mendengarkan musik melalui *headphone* sudah menjadi bagian dari hidup Anda? Setidaknya ada tiga tips yang bisa Anda ikuti, di antaranya:

Hindari penggunaan *earphone* yang kecil dan menutup lubang telinga secara keseluruhan. Gunakan *headphone* yang ukurannya lebih besar sehingga suara lebih terdistribusi dan lebih menutupi suara bising dari luar apabila dibandingkan dengan *earphone* yang kecil. Tipe *earbuds* kecil dengan *speaker* kecil dan volume besar yang diletakan di lubang telinga sudah pasti memberikan efek yang lebih besar pada pendengaran dibandingkan dengan *headphone* yang hanya ditempel pada telinga luar.

Jika ingin mendengarkan musik tanpa berpotensi mengganggu pendengaran, peneliti dan pakar kesehatan menyarankan untuk menggunakan aturan 60:60. Artinya, dengarkan musik tidak lebih dari 60 menit tiap hari. Selain itu, atur volume suara tidak melebihi 60 persen dari volume maksimal.

Hindari penggunaan *headphone* bersama-sama dengan orang lain dan bersihkan *headphone* secara teratur dengan produk disinfektan untuk membantu mengurangi penumpukan bakteri dan kuman.

Bagi Anda yang memang pekerjaannya sehari-hari memang menggunakan perangkat *headset*, seperti petugas *call center* misalnya, berikan istirahat telinga setiap 30 menit hingga satu jam.

Gunakanlah *headphone* dengan bijak agar fungsi indera pendengaran dapat terus berfungsi dengan baik.

ELIZA DWI ANGGRAENI
BDK MEDAN

Pesona Kuliner Kota Medan

Medan adalah kota dengan sejuta pesona, terutama bagi pecinta kuliner. Bila berkesempatan ke Medan, jangan lupa untuk memanjakan lidah dengan berbagai kuliner lezat yang wajib untuk dikunjungi. Medan biasanya terkenal dengan durian atau bolu meranti. Selain itu, masih banyak tempat makan, yang selain menawarkan hidangan lezat, juga memiliki perjalanan yang cukup panjang.



SOTO KESAWAN

Berbeda dengan hidangan jenis pada umumnya, soto ini menggunakan bahan utama udang. Berlokasi di Jl Ahmad Yani atau tepat di depan Tjong A Fie Mansion, salah satu bangunan kuno dengan arsitektur unik di Medan. Popularitas Soto Kesawan sudah terkenal. Harga satu porsinya cukup terjangkau, antara Rp25.000 – 30.000.

SATE KERANG

Jajanan yang selalu ada di setiap sudut kota Medan, terbuat dari Kerang Dara yang masih hidup (bercangkang) diolah menggunakan bumbu khas khusus. Biasanya disajikan di piring kecil yang berisi 6-10 tusuk sate. Harga per-tusuk berkisar Rp4.000.

BADAK

Badak adalah merek minuman berkarbonasi yang berusia hampir seratus tahun. Di botol minuman tertera gambar badak bercula satu dan tulisan "Badak". Badak telah melegenda di Kota Medan, Kota Pematang Siantar, dan sekitarnya. Badak dengan mudah ditemukan berdampingan dengan minuman bersoda lainnya, teh botol, dan air mineral di berbagai rumah makan. Mungkin, Badak satu-satunya minuman bersoda yang bisa bersaing dengan produk-produk bermerek internasional.

KOPI TANPAK SIDIKALANG

UD Tanpak Sidikalang merupakan salah satu UKM terbaik dari Sidikalang, Kabupaten Dairi yang telah berdiri sejak 1986. Sidikalang merupakan salah satu kabupaten penghasil kopi robusta terbaik dari Sumatera Utara yang sudah cukup dikenal. UD. Tanpak mengolah biji kopi robusta dengan cara tradisional, mulai dari cara menggongseng, hingga penggilingan kopi. Inilah yang membuat kopi Tanpak Sidikalang punya rasa tersendiri, yang sangat berbeda dengan kopi yang lain pada umumnya. Kopi Tanpak Sidikalang sudah cukup dikenal hingga seluruh Indonesia bahkan keluar negeri, aroma, rasa yang khas sulit untuk dilupakan, kopi Tanpak Sidikalang asli dari biji kopi Sidikalang "Djangan Dipuji Sebelum Dicoba"

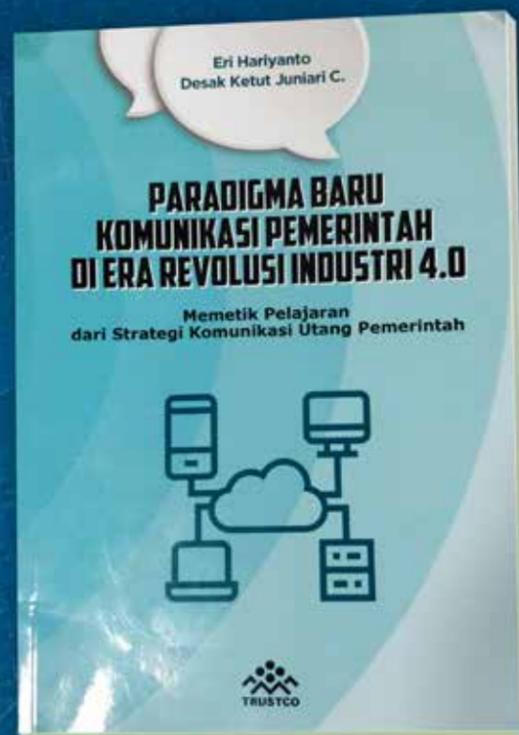
NASI GORENG TIP TOP SPESIAL

Nasi goreng ini merupakan salah satu ciri khas dari Tip Top Restaurant, yang berdiri sejak tahun 1929. Awalnya restoran ini dijadikan tempat berkumpulnya orang Belanda untuk menikmati sarapan atau secangkir kopi. Tapi setelah Indonesia merdeka, Tip Top perlahan mulai dikunjungi penduduk lokal. Kini, meski telah dikelilingi oleh bangunan modern, namun Tip Top restoran masih konsisten dengan dekorasi restorannya yang bergaya Eropa dan terdapat beberapa meja di bagian luarnya. Harga satu porsinya cukup terjangkau, antara Rp45.000 – 50.000.

ICE CREAM APO

Ice Cream APO terletak di Jalan Ahmad Yani Medan. Ice Cream yang disediakan terdiri dari berbagai rasa, yaitu coklat, strawberry, jeruk, dan kacang merah. Selain es krim juga tersedia es krim soda yang merupakan campuran dari es soda (limun) dengan es krim. Harga satu porsinya cukup terjangkau, berkisar Rp20.000.

Jadi ngiler kan melihat foto-fotonya? Pokoknya wajib untuk dicoba ya kalau kamu lagi jalan-jalan ke Medan.



ARDES M. Y. SITANGGANG

Paradigma Baru Komunikasi Pemerintah di Era Revolusi Industri 4.0

PENGARANG : ERI HARIYANTO DAN
DESAK KETUT JUNIARI C
PENERBIT : TRUSTCO
JUMLAH HALAMAN : 140
TAHUN TERBIT : 2019

Masyarakat umumnya masih mengenal pemerintah dengan “zaman old” yang kuno dan lamban. Paradigma tersebut membuat anggapan terhadap pemerintah yang susah berubah di zaman digital saat ini yang sangat mudah terdisrupsi oleh perkembangan teknologi. Akan tetapi, banyak yang tidak menyadari, bahwa pemerintah saat ini juga melakukan transformasi untuk menyambut perkembangan digital dan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan umumnya tidak terlihat secara langsung, akan tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Hal inilah yang dikupas dalam buku Paradigma Baru Komunikasi Pemerintah Di Era Revolusi Industri 4.0.

Buku ini secara khusus mengupas tentang transformasi perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam upaya pelayanan publik yakni pentingnya komunikasi yang efektif terkait kebijakan publik. Terbagi dalam 4 bagian, perubahan komunikasi pemerintah dibahas bertahap mulai dari secara teori, paradigma baru mode komunikasi pemerintah, dinamika komunikasi pemerintah, hingga diakhiri dengan strategi komunikasi utang pemerintah. Bagian Peran Pemerintah dan Pentingnya Mengkomunikasikan Kebijakan Publik membahas tentang peranan pemerintah di dunia digital. Peran pemerintah dalam era teknologi modern bukannya berkurang akan

perubahan struktur organisasi, proses bisnis ataupun infrastruktur, tetapi juga budaya dan penggunaan sumber informasi yang majemuk. Sehingga, pemerintah bisa menjadi lebih adaptif, responsif, dan akuntabel dalam mengadopsi suatu kebijakan.

Bagian Ketiga, secara khusus membahas paradigma yang dialami oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dalam menghadapi kegaduhan pembahasan utang pemerintah yang menarik perhatian publik. Tidak hanya itu, buku ini membahas sedikit tentang pelajaran ekonomi, tentang bagaimana utang, mengapa pemerintah harus berutang, dan bagaimana kebijakan utang pemerintah. Berangkat dari kegaduhan utang tersebut, dilakukan pembahasan

kemudian memberikan keyakinan kepada masyarakat luas terkait kebijakan utang pemerintah. Tidak hanya menyampaikan strategi, dalam buku ini juga diberikan contoh langkah konkret yang dilakukan Biro KLI Kementerian Keuangan dalam menghadapi *hoax*, berita miring dan *tone* berita negatif terkait pemberitaan utang pemerintah. Baik dari penentuan tujuan, sasaran, pesan, bentuk kegiatan, instrumen, dan sumber daya yang dikelola dalam menghadapi pemberitaan utang pemerintah. Tidak hanya yang sudah dilakukan, buku ini juga menyampaikan langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan strategi komunikasi.

Buku Paradigma Baru Komunikasi Pemerintah di Era Revolusi Industri

Pelajaran yang didapat dari buku ini bisa menjadi referensi bagi pelaku komunikasi pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan yang diambil, sehingga kegaduhan dan tendensi negatif dalam suatu kebijakan dapat diminimalisasi, dengan menyesuaikan karakteristik dari strategi dan kebijakan dari pemerintah.

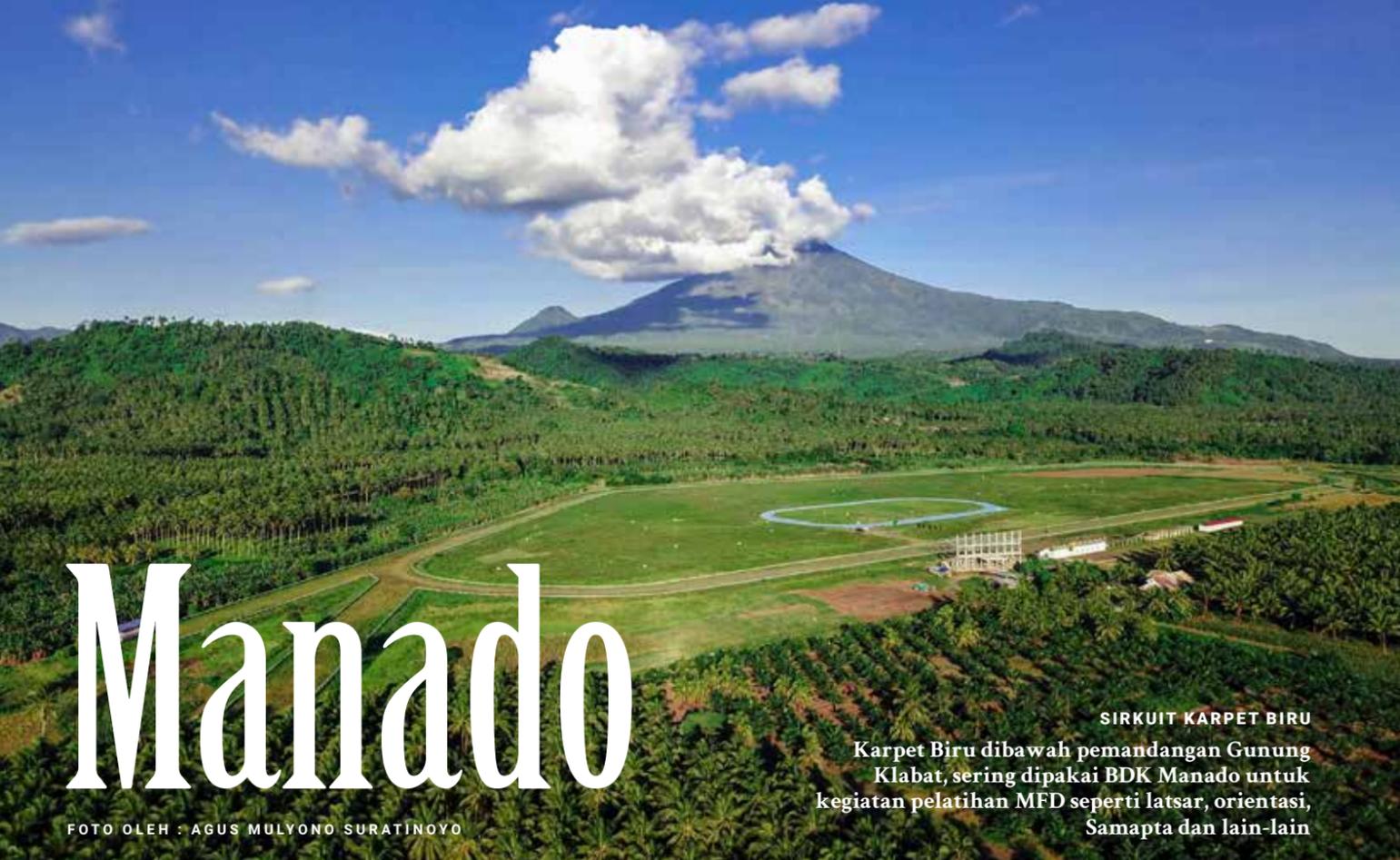
tetapi menjadi lebih strategis dalam menyejahterakan masyarakat. Bagian pertama ini lebih banyak mengupas teori tentang peran dan fungsi pemerintah yang ideal, baik menurut ahli-ahli dan lembaga-lembaga internasional. Tak lepas juga dibahas pentingnya peran komunikasi atas pelaksanaan fungsi pemerintah tersebut. Dicontohkan dalam buku ini, peneringkatan rating utang pemerintah diiringi komunikasi yang efektif meningkatkan kepercayaan publik atas pemerintah, tidak hanya masyarakat dalam negeri, tetapi juga internasional.

Peningkatan peran teknologi, terutama internet, akan mengubah paradigma baru komunikasi pemerintah. Sebagaimana dibahas di bagian dua, penggunaan internet yang mendominasi di Indonesia mengungkapkan pentingnya pemanfaatan internet untuk pelayanan publik. Internet juga memengaruhi gaya hidup, sehingga transformasi birokrasi di era digital menjadi suatu keharusan. Transformasi yang dilakukan tersebut tidak hanya

terkait opini masyarakat terkait utang pemerintah. Selayaknya pendapat pada umumnya, selalu ada pro kontra, demikian juga terkait dengan utang pemerintah. Sehingga, diperlukan strategi mengomunikasikan utang tersebut untuk mendidik masyarakat agar memahami dan mendapatkan simpati terhadap utang pemerintah tersebut.

Strategi Kementerian Keuangan dalam menghadapi kegaduhan utang pemerintah dibahas secara rinci dalam bagian terakhir. Dimulai dari struktur organisasi Kementerian Keuangan dalam melakukan komunikasi dengan umum, dalam hal ini Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) Kementerian Keuangan, dilanjutkan dengan strategi-strategi *branding* Kementerian Keuangan secara umum, dan komunikasi utang secara khusus. Strategi yang dilakukan antara lain memberikan fakta yang tidak terbantahkan tentang utang pemerintah, memberikan informasi pilihan,

4.0 merupakan buku yang cukup unik, mengupas secara teoretis, tidak hanya dari sisi komunikasi tetapi juga ekonomi, terkait utang pemerintah. Hal ini disebabkan pelajaran yang diambil adalah terkait strategi utang pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi proporsi yang menunjukkan betapa pentingnya komunikasi kebijakan publik tersebut terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami kebijakan dari pemerintah. Pelajaran yang didapat dari buku ini bisa menjadi referensi bagi pelaku komunikasi pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan yang diambil, sehingga kegaduhan dan tendensi negatif dalam suatu kebijakan dapat diminimalisasi, dengan menyesuaikan karakteristik dari strategi dan kebijakan dari pemerintah.



Manado

FOTO OLEH : AGUS MULYONO SURATINOYO

SIRKUIT KARPET BIRU

Karpet Biru dibawah pemandangan Gunung Klabat, sering dipakai BDK Manado untuk kegiatan pelatihan MFD seperti latsar, orientasi, Samapta dan lain-lain

BOULEVARD PUSAT KOTA MANADO

Pemandangan boulevard malam hari, yang merupakan pusat kota Manado



TARI KABASARAN

Tari Kabasaran merupakan tarian perang suku Minahasa



SPOT SNORKELING BUNAKEN

Dari kejauhan terlihat pulau Manado Tua



GUNUNG KLABAT

View Gunung Klabat dari pedesaan di dekat BDK Manado



DANAU LINAU

Danau Linau terlihat dari atas bukit, salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi ketika ke Manado

KANG EDU

CERITA & ILUSTRASI : BIMO ADI



NGOBROL BARENG KEMENKEU CORPU, PASTI SERU!

Cuma di Podcast KEMENKEU CORPU LEARNING ON AIR (ECLAIR) kalian bisa belajar keuangan negara dan berbagai hal kapan saja di mana saja.

SAMBIL KERJA ATAU SANTAI, MENGAPA TIDAK?

Dengarkan Eclair melalui:



Google Podcasts

KEMENKEU LEARNING CENTER
klc.kemenkeu.go.id

ECLAIR
KEMENKEU CORPU LEARNING ON AIR

YUK SEGERA IKUTI...
E-Learning
KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU
PNS KEMENKEU



diakses melalui KEMENKEU LEARNING CENTER:
klc.kemenkeu.go.id
[LOGIN MENGGUNAKAN KEMENKEU ID]

**TENTUKAN BATCH
PILIHANMU!**

Batch I
15 - 19 Juli 2019
s.d.
Batch XVI
28 Okt - 1 Nov 2019
(HANYA 5.000 ORANG PER BATCH)

Informasi lebih lanjut, hubungi:
Call Center: (021) 2905 4300
Email: bppk.hubungikami@kemenkeu.go.id

#BELAJARTANPABATAS

ISSN: 2086-4833



9 772086 483008

